



LAPORAN KINERJA DIREKTORAT SMK

**20
24**

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2024 dengan tepat waktu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis/sasaran program/sasaran kegiatan beserta indikator kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan tahun 2024. Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan pada tahun 2024 menetapkan tiga sasaran dan empat indikator kinerja. Secara umum, Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Meskipun semua target telah tercapai, namun masih terdapat beberapa kendala yang berpotensi untuk terulang di tahun mendatang sehingga diperlukannya antisipasi untuk menghadapinya. Kendala tersebut yaitu koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi atau lembaga mitra kerjasama lainnya yang masih belum optimal. Disamping itu, masih perlu adanya harmonisasi program yang dilaksanakan masing-masing pihak untuk menghindari adanya tumpang tindih penganggaran dari pemerintah pusat dan pemda. Dengan dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan permasalahan yang dihadapi tersebut dapat segera terselesaikan.

Melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan pada tahun 2024. Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan pada tahun 2024.

Jakarta, 17 Januari 2025
Direktur Sekolah Menengah Kejuruan



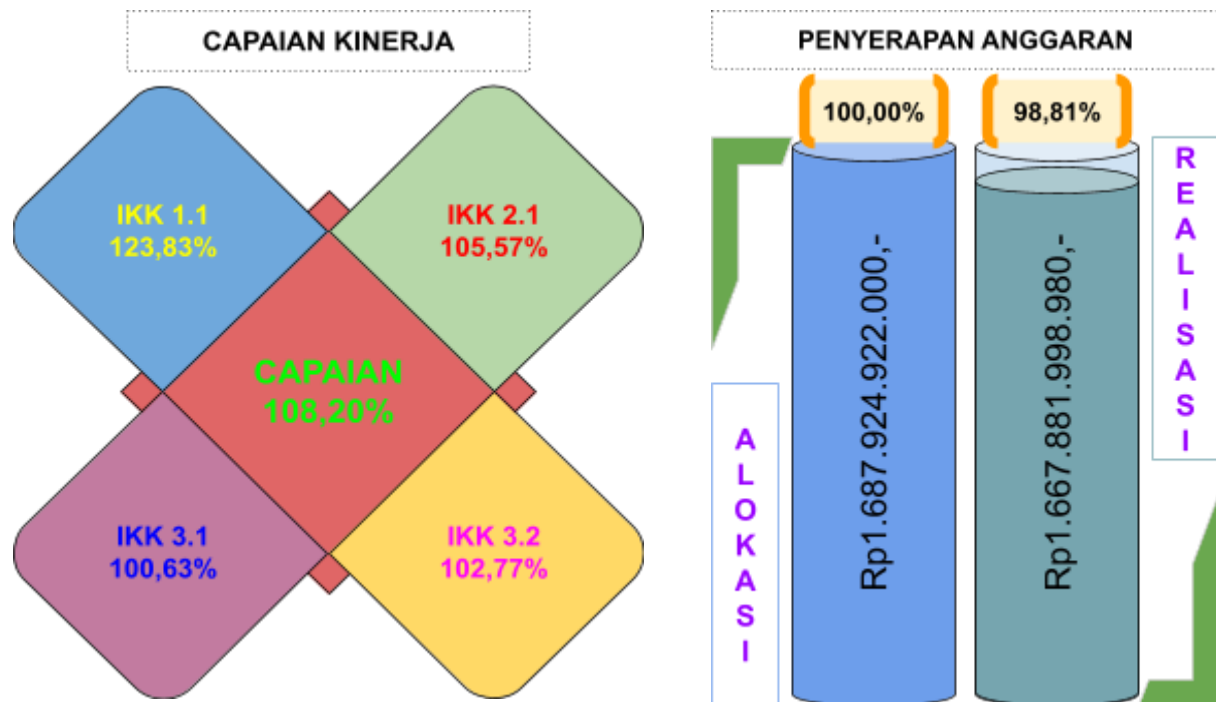
Muhammad Yusro

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	2
Daftar Isi.....	3
Ikhtisar Eksekutif.....	4
BAB I - Pendahuluan.....	8
A. Gambaran Umum.....	8
B. Dasar Hukum.....	9
C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi.....	9
1. Tugas.....	9
2. Fungsi.....	10
3. Struktur Organisasi.....	11
4. Isu-Isu Strategis/Permasalahan.....	11
BAB II - Perencanaan Kinerja.....	13
A. Rencana Strategis.....	13
B. Program Prioritas 2020-2024.....	14
C. Rencana Kerja dan Anggaran.....	18
D. Perjanjian Kinerja.....	19
BAB III - Akuntabilitas Kinerja.....	23
A. Akuntabilitas Kinerja.....	23
1. Sasaran Kegiatan 1.....	23
2. Sasaran Kegiatan 2.....	27
3. Sasaran Kegiatan 3.....	31
B. Capaian Program/Agenda Prioritas.....	35
1. Siswa SMK yang Tersertifikasi Terhadap Kompetensi yang Relevan dengan Kebutuhan Dunia Kerja.....	35
2. SMK yang Dikembangkan Menjadi Pusat Keunggulan.....	36
3. SMK yang Mengembangkan Proyek Kreatif dan Kewirausahaan.....	36
4. SMK yang Dikembangkan Berbasis Industri 4.0.....	37
C. Realisasi Anggaran.....	37
1. Capaian Anggaran.....	37
2. Efisiensi dan Optimalisasi Anggaran.....	39
D. Kinerja Lain-lain.....	40
1. Reformasi Birokrasi.....	40
2. Informasi Capaian Kinerja Lainnya yang mendukung.....	40
3. Program Crosscutting/Collaborative.....	41
BAB IV - Penutup.....	43
Lampiran.....	46

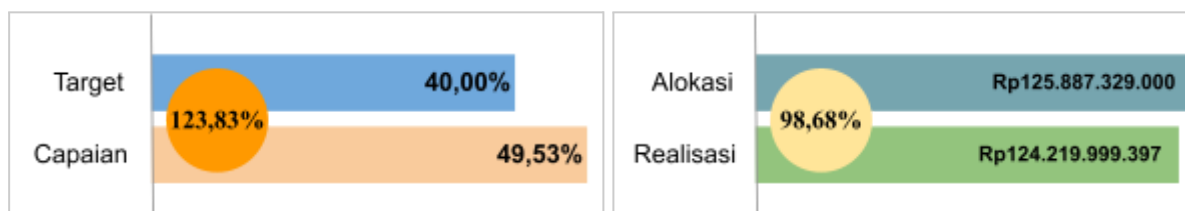
Ikhtisar Eksekutif

Laporan kinerja Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan 2024 menyajikan tingkat pencapaian sebanyak tiga sasaran dengan empat indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024. Tingkat ketercapaian dan ketidak capaian indikator kinerja lebih detail diuraikan pada BAB III. Secara umum, capaian kinerjanya adalah sebagai berikut.



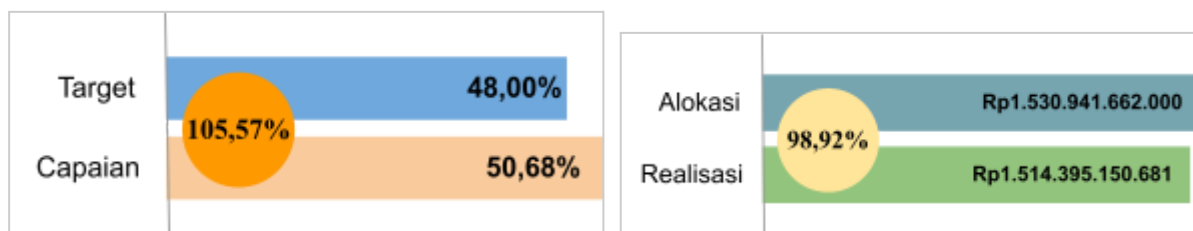
[SK 1] Meningkatnya kompetensi lulusan SMK yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja

IKK 1.1 Persentase lulusan SMK yang berhasil memperoleh kompetensi yang sesuai dengan dunia kerja



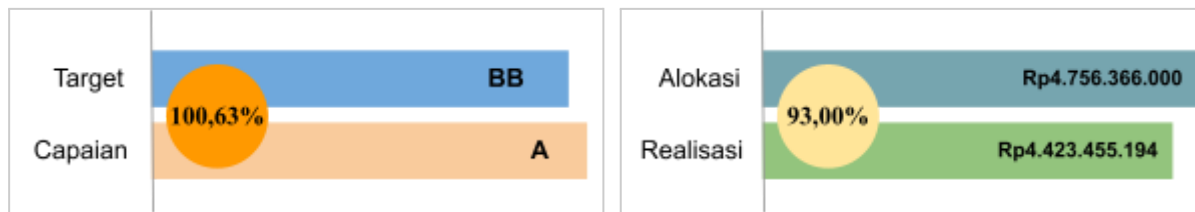
[SK 2] Meningkatnya relevansi pembelajaran SMK dengan kebutuhan dunia kerja

IKK 2.1 Persentase SMK yang menerapkan pembelajaran link and match dengan dunia kerja

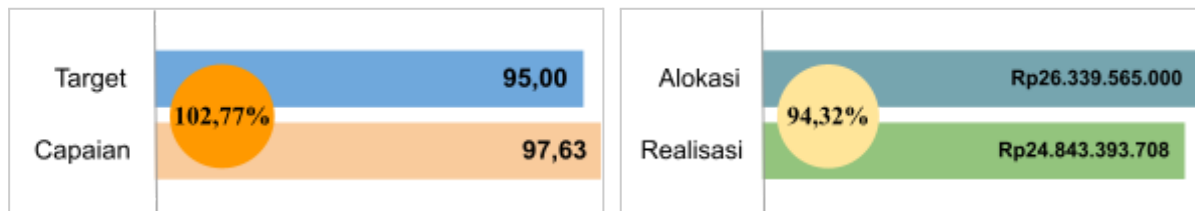


[SK 3] Meningkatkan tata kelola Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan

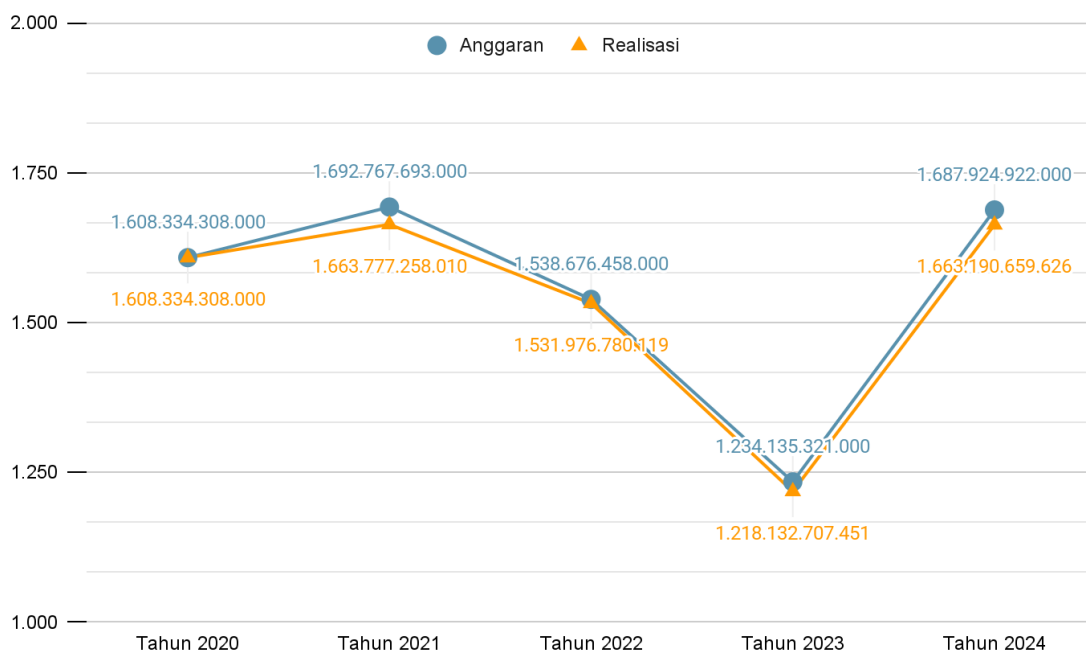
IKK 3.1 Predikat SAKIP Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan



IKK 3.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan



Berikut tren alokasi dan realisasi anggaran Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan dari tahun 2020 sampai tahun 2024.



Berdasarkan dari grafik di atas, dapat dikatakan bahwa alokasi anggaran selama tahun 2020 hingga tahun 2024 bersifat fluktuatif, meski target kinerja kegiatan Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan meningkat setiap tahunnya.

Selama tahun 2024, terdapat permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target, antara lain:

1. Mendorong lulusan agar memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja merupakan output dari pendidikan SMK, tentunya untuk mengukur kompetensi keahlian diperlukan alat ukur

yang terpercaya dan independen. Pada pelaksanaannya banyak satuan pendidikan belum mampu menyediakan uji kompetensi keahlian kepada peserta didiknya melalui pola yang lebih dipercaya yaitu melalui LSP berlisensi BNSP dan sertifikasi dunia kerja/asosiasi profesi. Hal ini dikarenakan membutuhkan biaya anggaran yang cukup tinggi untuk pelaksanaan sertifikasi dengan standar asosiasi profesi/industri maupun LSP berlisensi BNSP.

2. Meningkatkan keterserapan lulusan baik bekerja maupun wirausaha merupakan target utama dari pendidikan menengah kejuruan/SMK, tentunya untuk mendukung hal ini perlu adanya sistem pembelajaran yang memang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Melalui pengembangan SMK untuk menjadi pusat keunggulan, lembaga pendidikan menengah kejuruan diintervensi dan difasilitasi untuk menerapkan model pembelajaran yang berkolaborasi dengan industri. Namun, tidak meratanya sebaran industri nasional yang memadai untuk menjalin kerjasama menjadikan SMK di beberapa Indonesia tidak dapat melaksanakan kerjasama ini dengan optimal.
3. Menguatkan tata kelola dan kelembagaan satuan pendidikan SMK menjadi langkah penting dalam implementasi sistem pendidikan menengah kejuruan dikarenakan sekolah merupakan garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan peserta didik. Sebaran sekolah yang belum merata serta keterbatasan akses untuk melakukan kerjasama dengan dunia kerja serta lembaga lainnya menjadikan peningkatan kualitas dan mutu kelembagaan SMK belum meningkat secara rata-rata yang mempunyai kategori baik. Disamping itu, perubahan kepemimpinan sekolah dapat membawa dampak yang signifikan bagi tata kelola dan kelembagaan SMK.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang muncul, antara lain:

1. Diberikan *skill passport* dimana untuk memperoleh sertifikasi penuh berlisensi BNSP yang merupakan panduan dan catatan bagi siswa SMK dalam proses belajar dan berlatih untuk mencapai standar kompetensi/kompetensi dasar, yang keseluruhannya diperlukan sebagai syarat kelulusan. Metode penilaian ini berfungsi untuk mengecek dan mengetahui tingkat kemahiran siswa SMK pada setiap mata pelajaran, baik normatif maupun produktif.
2. Pemantaembelajaran kewirausahaan di SMK sangat penting untuk membekali siswa dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam menjalankan usaha sendiri atau bekerja di dunia bisnis. Berikut beberapa langkah yang bisa diambil untuk mengembangkan pembelajaran kewirausahaan diantaranya mengintegrasikan mata pelajaran kewirausahaan dalam kurikulum untuk memberikan pemahaman dasar mengenai bisnis, manajemen, dan keuangan. Melibatkan siswa dalam proyek-proyek bisnis nyata, seperti simulasi bisnis, bazaar sekolah, atau program inkubasi bisnis, untuk memberikan pengalaman praktis. Menyelenggarakan pelatihan dan workshop tentang kewirausahaan yang melibatkan praktisi bisnis sukses sebagai narasumber. Membentuk program mentoring dan coaching untuk memberikan bimbingan kepada siswa dalam mengembangkan ide bisnis dan menjalankan usaha. Menjalinkan kerjasama dengan pelaku usaha dan industri untuk memberikan siswa akses ke jaringan bisnis dan kesempatan magang. Mengadakan

pameran dan kompetisi bisnis untuk mendorong siswa mempresentasikan ide-ide inovatif mereka dan mendapatkan umpan balik dari para ahli.

3. Penguatan kelembagaan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan siapnya lulusan dalam dunia kerja. Beberapa upaya dilakukan melalui pemberian program dengan komponen yang dapat dilaksanakan diantaranya: Meningkatkan kompetensi guru dan staf administrasi melalui pelatihan reguler yang sesuai dengan perkembangan industri dan kebutuhan pasar; Mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja, sehingga siswa mendapatkan keterampilan yang sesuai dan siap bersaing di pasar tenaga kerja; Membangun kemitraan dengan industri untuk menciptakan program magang dan kerja sama dalam pengembangan kurikulum, sehingga siswa memiliki pengalaman nyata di lapangan; Memperbaiki dan menambah fasilitas pendidikan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan, termasuk laboratorium, ruang praktik, dan teknologi informasi.
4. Upaya peningkatan tata kelola sekolah merupakan langkah penting untuk memastikan keberhasilan pendidikan dan manajemen yang efektif. Beberapa strategi melalui program yang diberikan kepada sekolah dan diterapkan untuk meningkatkan tata kelola sekolah, diantaranya peningkatan profesionalisme kepala sekolah yang harus memiliki kompetensi manajerial dan kepemimpinan yang kuat. Pelatihan dan pengembangan profesional untuk kepala sekolah sangat penting. Penguatan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) diperlukan dengan menekankan pada partisipasi seluruh pemangku kepentingan, seperti guru, orang tua, dan masyarakat, dalam proses pengambilan keputusan. Mengintegrasikan teknologi dalam manajemen sekolah, seperti sistem informasi manajemen sekolah (SIMS), untuk mempermudah proses administrasi dan komunikasi. Disamping juga sekolah dalam implementasi Kurikulum Merdeka diarahkan untuk menyusun kurikulum satuan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan siswa dan dunia kerja, serta melibatkan industri dalam proses pengembangannya.

BAB I - Pendahuluan

A. Gambaran Umum

Sesuai dengan peraturan Permendikbudristek No. 28 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan merupakan satuan kerja pada Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan pertama kali dibentuk pada Desember 2019 sesuai dengan Permendikbud No. 45 Tahun 2019. Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan dipimpin oleh seorang direktur dengan jumlah SDM sebanyak 96 ASN (94 PNS dan 2 PPPK) dan 90 PPNPN. Wilayah kerja Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan melingkupi seluruh sekolah menengah kejuruan yang ada di Indonesia.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat SMK, maka Direktur dan Kasubbag Tata Usaha, sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 262/O/2023 tentang Penyesuaian Sistem Kerja pada Unit Kerja di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dibantu oleh lima tim kerja. Pembagian tim kerja disesuaikan dengan tugas dan fungsi Direktorat SMK yakni tim kerja Program, Data, dan Evaluasi; Penjaminan Mutu Implementasi Kurikulum Merdeka dan Penilaian; Penjaminan Mutu Peserta Didik dan Tata Kelola; Fasilitasi Peningkatan Kapabilitas Pendidik & Tenaga Kependidikan; dan Transformasi SMK sebagai Pusat Keunggulan.

Direktorat SMK dituntut untuk melaksanakan kinerja dengan bijak, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut termasuk diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Laporan Kinerja (Lakin) disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Direktorat SMK dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2024 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Kemendikbud-Ristek. Lakin Direktorat SMK sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Direktorat SMK, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholders* demi perbaikan kinerja Direktorat SMK.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi acuan antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
11. Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi 2020-2024; dan
12. Renstra Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan 2020-2024.

C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi

1. Tugas

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 tahun 2021 pasal 128, Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sekolah menengah kejuruan dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah kejuruan.

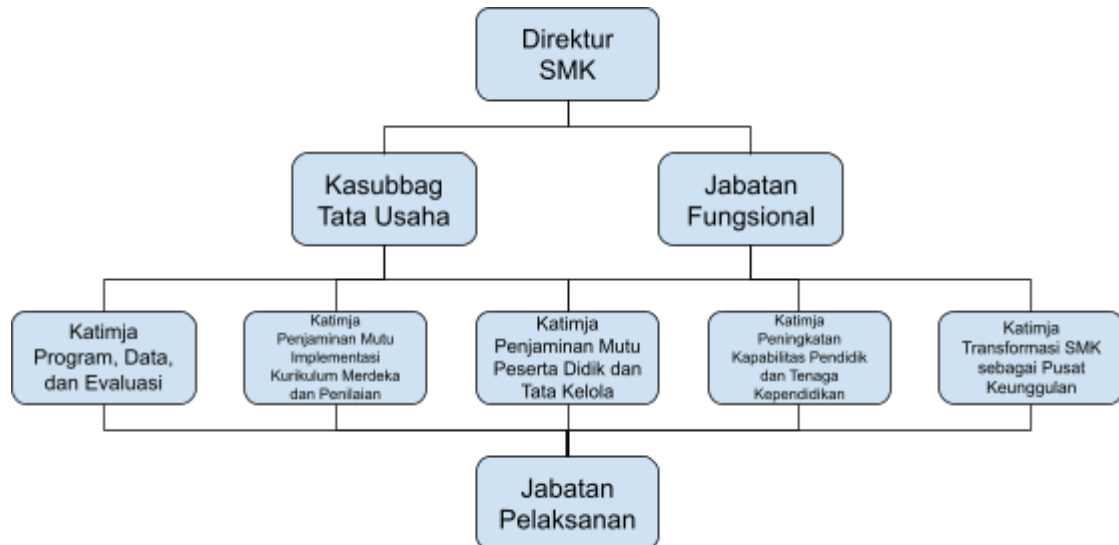
2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah menengah kejuruan dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah kejuruan;
- b. penyusunan norma, prosedur, dan kriteria di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah menengah kejuruan dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah kejuruan;
- c. penyusunan norma, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan kompetensi vokasional guru vokasi, pendidik vokasi lainnya, dan tenaga kependidikan vokasi pada sekolah menengah kejuruan;
- d. pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah menengah kejuruan dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah kejuruan;
- e. pelaksanaan kebijakan di bidang standar peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah menengah kejuruan dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah kejuruan;
- f. fasilitasi penyelenggaraan di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah menengah kejuruan dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah kejuruan;
- g. fasilitasi di bidang pembinaan kompetensi vokasional guru vokasi, pendidik vokasi lainnya, dan tenaga kependidikan vokasi pada sekolah menengah kejuruan;
- h. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah menengah kejuruan dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah kejuruan;
- i. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan kompetensi vokasional guru vokasi, pendidik vokasi lainnya, dan tenaga kependidikan vokasi pada sekolah menengah kejuruan;
- j. penyiapan perumusan pemberian izin penyelenggaraan sekolah menengah kejuruan yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing dan sekolah menengah kejuruan kerja sama yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan asing dengan lembaga pendidikan Indonesia;
- k. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sekolah menengah kejuruan; dan
- l. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

3. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Permendikbudristek No. 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, pasal 130 Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan terdiri dari tata usaha dan jabatan fungsional.



Gambar 1.1. Struktur Direktorat SMK Tahun 2024

Ada lima tim kerja yang dibentuk yang menyesuaikan dengan tugas dan fungsi Direktorat SMK. Setiap tim kerja beranggotakan oleh jabatan fungsional dan jabatan pelaksana yang dibagi sesuai dengan kebutuhan tugas dari masing-masing tim kerja.

4. Isu-Isu Strategis/Permasalahan

Beberapa permasalahan/isu strategis yang menjadi perhatian antara lain:

- Masih minimnya media pembelajaran untuk pendidikan menengah kejuruan yang menjadikan beberapa SMK di daerah mengalami keterbatasan dalam memberikan materi pembelajaran bagi peserta didik. Pengembangan konten/media pembelajaran pada jenjang belum berjalan secara optimal dikarenakan cukup banyaknya tema yang harus dibuat sesuai dengan jumlah kompetensi keahlian.
- Belum adanya sistem yang memberikan informasi terkait kebutuhan (demand) berupa pasar atau bursa tenaga kerja yang dapat dijadikan rekomendasi dalam melakukan buka tutup terhadap kompetensi keahlian yang diselenggarakan di SMK.
- Kerjasama dengan dunia kerja dan industri dalam penataan dan penyusunan spektrum keahlian berdasarkan perkembangan pasar kerja sebagai bentuk pemutakhiran konsentrasi keahlian di SMK. Selain itu, dalam pengembangan sistem pembelajaran yang sesuai dengan SMK sudah harus mulai menyiapkan pembelajaran dengan model kelas industri. Dimana kurikulumnya disusun bersama dunia kerja/industri dengan memperbanyak pembelajaran praktik sesuai dengan kondisi alur kerja sama dengan kondisi di industri.

- d. Berlakunya pasar global menjadikan mau tidak mau tenaga kerja yang harus mampu bersaing dengan negara lain, hal ini menjadikan kompetensi bahasa asing harus menjadi kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh siswa SMK. Disamping itu, perkembangan dunia teknologi melalui penerapan *artificial intelligence* (AI) juga mewajibkan peningkatan kompetensi numerasi dan literasi siswa SMK yang harus setara dengan siswa-siswa di negara lain.

Sementara peran strategis Direktorat Sekolah Menengah kejuruan dalam pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan menengah kejuruan diantaranya:

- a. Mempunyai peranan dalam memfasilitasi pemerataan mutu dan kualitas pendidikan pada sekolah menengah kejuruan secara nasional melalui koordinasi dengan pemerintah daerah selaku yang berwenang dalam memberikan pembinaan dan pengelolaan kepada satuan pendidikan SMK;
- b. Menjadi fasilitator dengan K/L lainnya untuk mendorong dalam pembangunan serta pengembangan sistem informasi terkait kebutuhan pasar kerja. Melalui koordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja permintaan akan kebutuhan tenaga terampil dari pasar kerja dapat diharmonisasikan dengan kompetensi lulusan SMK. Disamping itu, melalui koordinasi dengan instansi yang berkaitan dengan industri dan perdagangan, SMK yang diberdayakan dengan pelibatan dalam produksi barang dan jasa sehingga terbentuk sistem pembelajaran yang sesuai dengan kondisi di dunia kerja (*teaching factory*).
- c. Pendidikan menengah kejuruan perlu dikembangkan sesuai dengan potensi yang terdapat di sekitar wilayah SMK didirikan, peran penting Direktorat SMK dalam melakukan koordinasi serta rekomendasi kepada pemda/ dinas pendidikan untuk melakukan buku tutup SMK yang memang dapat mendukung peningkatan sumber daya wilayah tersebut.

BAB II - Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Sebagai bagian dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi yang mengemban amanat meningkatkan pembangunan SDM melalui peningkatan mutu layanan pendidikan dan memajukan kebudayaan. Berlandaskan Visi Presiden pada RPJMN Tahun 2020-2024 dan Visi Indonesia 2045 maka Direktorat SMK, Ditjen Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi memiliki Visi 2020-2024 adalah:

“Membangun dan mewujudkan Pendidikan Kejuruan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif”

Visi tersebut akan diwujudkan dengan berbagai langkah yang mengacu kepada 3 (tiga) misi berikut:

- Mewujudkan pendidikan kejuruan yang berkualitas tinggi, relevan merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
- Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.
- Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan kejuruan.

Tujuan Kinerja:

Tujuan pendidikan menengah khususnya Sekolah Menengah Kejuruan merupakan derivasi dari tujuan penyelenggaraan pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang termaktub dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024. Tujuan ini juga mendukung dari arahan pembangunan nasional yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Dengan demikian, tujuan penyelenggaraan pendidikan yang menjadi dasar program kerja Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan selama tahun 2020-2024 yaitu sebagai berikut:

- Perluasan akses pendidikan bagi peserta didik SMK yang berkeadilan dan inklusif
- Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan
- Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter
- Penguatan sistem tata kelola pendidikan SMK yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

Rencana Kinerja Jangka Menengah:

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan menetapkan sasaran, indikator, dan hingga tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 2.1. Rencana Kinerja Jangka Menengah Dit. SMK

Kode	Uraian	Satuan	Baseline 2020	Target 2022	Target 2023	Target 2024
1.0	<u>Sasaran Kegiatan</u> Meningkatnya kompetensi lulusan SMK yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja					
IKK 1.1	Persentase lulusan SMK yang berhasil memperoleh kompetensi yang sesuai dengan dunia kerja	%	20	33	36	40
2.0	<u>Sasaran Kegiatan</u> Meningkatnya relevansi pembelajaran SMK dengan kebutuhan dunia kerja					
IKK 2.1	Persentase SMK yang menerapkan pembelajaran link and match dengan dunia kerja	%	6	24	36	48

B. Program Prioritas 2020-2024

Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan dalam mendukung program prioritas Kementerian melalui program Merdeka Belajar turut serta melaksanakan Episode 1 - Asesmen Nasional, PPDB; Episode 3 - Penyaluran dan Penggunaan Dana BOSP; Episode 5 - Guru Penggerak; Episode 8 - SMK PK; Episode 12 - SIPLah; Episode 15 - Kurikulum Merdeka dan PMM; Episode 19 - Rapor Pendidikan; Episode 23 - Buku Bacaan Bermutu untuk Literasi; dan Episode 25 - Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satpen.

Adapun Program Prioritas yang dilakukan oleh Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan, sebagai berikut:

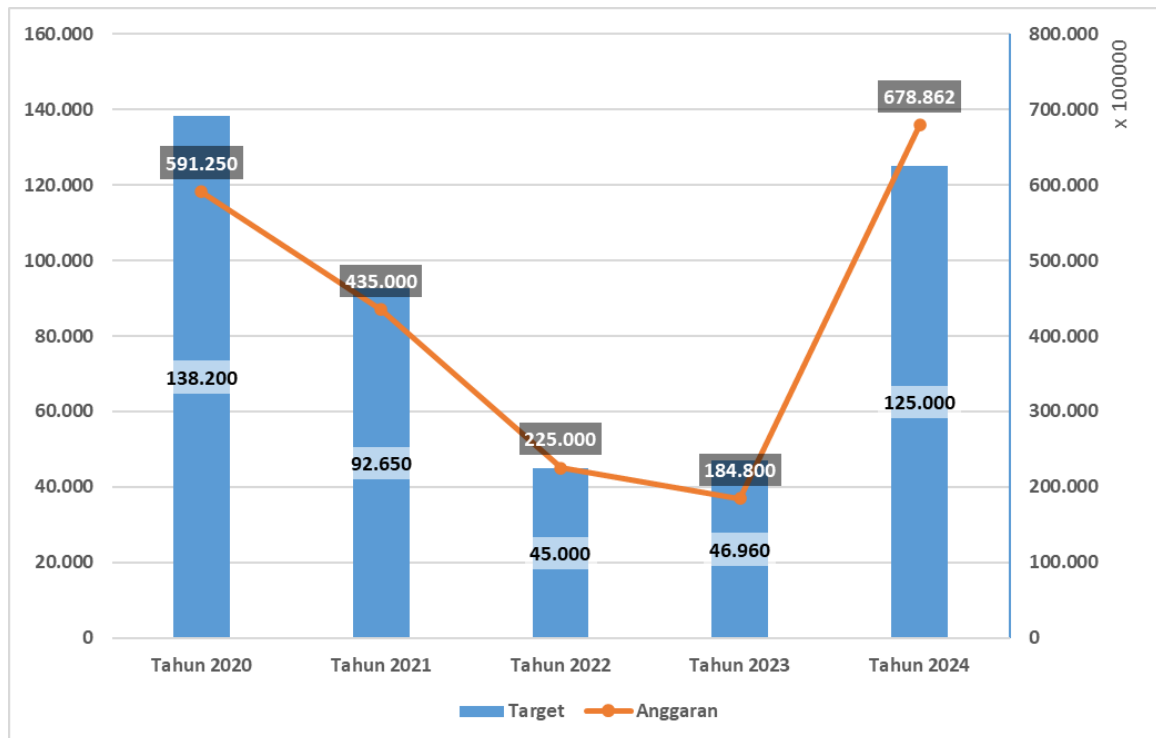
Tabel 2.2. Program Prioritas Dit. SMK

No.	Nama Program Prioritas
1	Siswa SMK yang Tersertifikasi Terhadap Kompetensi yang Relevan dengan Kebutuhan Dunia Kerja
2	SMK yang Dikembangkan Menjadi Pusat Keunggulan
3	SMK yang Mengembangkan Proyek Kreatif dan Kewirausahaan
4	SMK yang Dikembangkan Berbasis Industri 4.0

Rencana target dan anggaran masing-masing program setiap tahunnya fluktuatif, tergantung dengan kebijakan yang berlaku setiap tahunnya. Harga satuan pada target juga berbeda setiap tahunnya sehingga nilai anggaran belum tentu berbanding lurus dengan target.

Program Prioritas 1. Siswa SMK yang Tersertifikasi Terhadap Kompetensi yang Relevan dengan Kebutuhan Dunia Kerja

Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK adalah upaya mencetak lulusan tersertifikasi yang diakui dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang penyelenggaraannya sertifikasinya diselenggarakan atau dikoordinasikan oleh SMK.

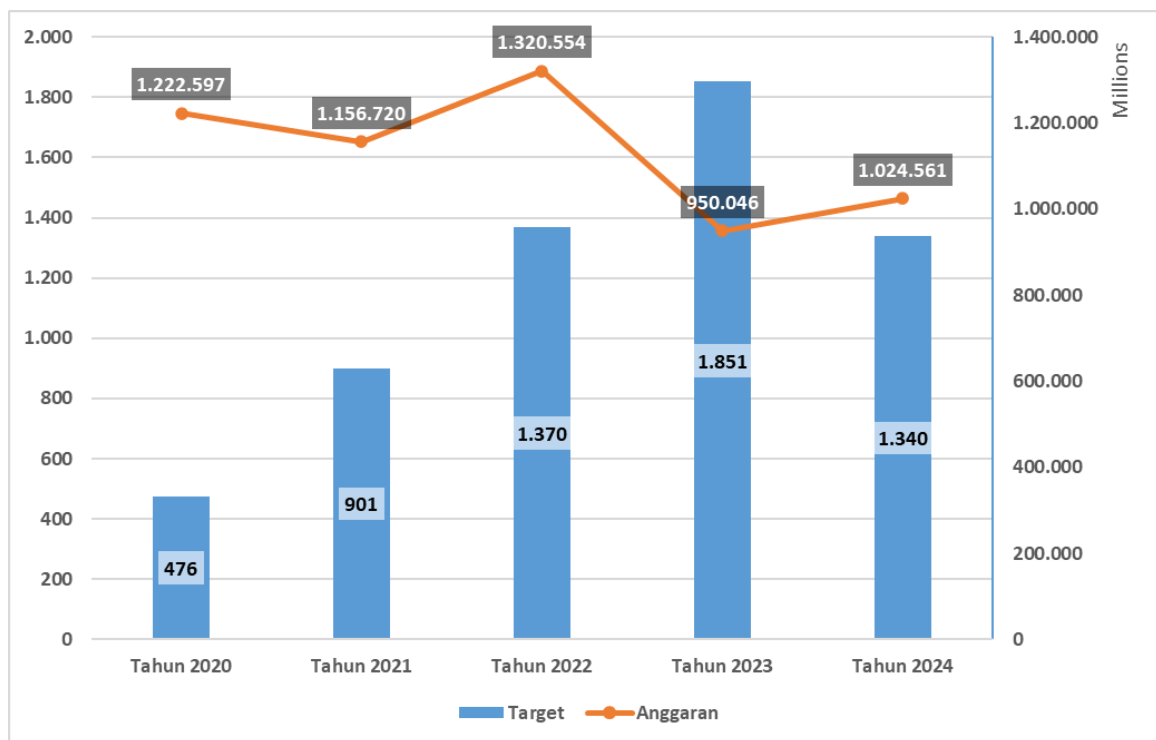


Gambar 2.1. Rencana Target dan Anggaran Prioritas 1 Dit. SMK

Tujuan dari pelaksanaan sertifikasi adalah untuk meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia SMK; menyelaraskan kurikulum SMK sesuai dengan kompetensi kebutuhan Dunia Kerja yang memiliki sistem sertifikasi tersendiri; meningkatkan akses bagi siswa dan lulusan SMK untuk mengikuti pelatihan, ujian, dan mendapatkan sertifikat kompetensi; dan meningkatkan kualitas pembelajaran di SMK dalam rangka penyelarasan skema dan program sertifikasi kompetensi.

Program Prioritas 2. SMK yang Dikembangkan Menjadi Pusat Keunggulan

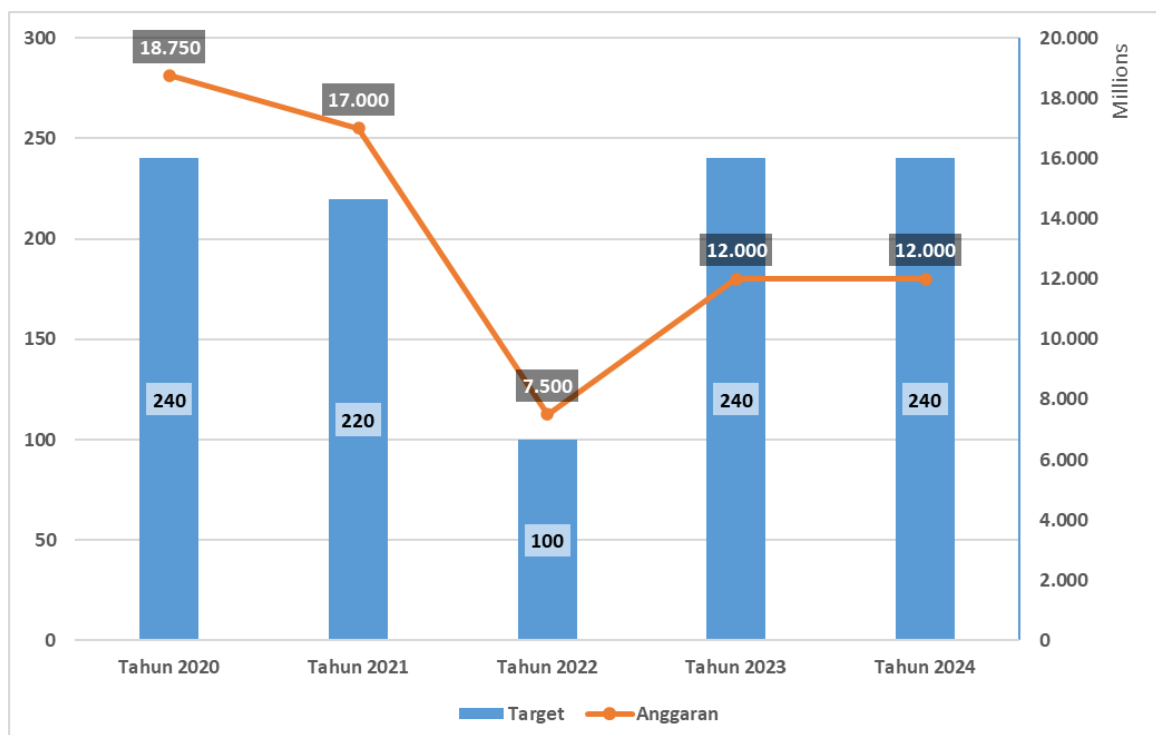
SMK Pusat Keunggulan adalah program pengembangan SMK dengan program keahlian tertentu melalui peningkatan kualitas dan kinerja, yang diperkuat melalui kemitraan dan penyelarasan dengan Dunia Kerja, serta menjadi rujukan yang memiliki semangat pengimbasan serta pusat peningkatan kualitas dan kinerja SMK lainnya.



Gambar 2.2. Rencana Target dan Anggaran Prioritas 2 Dit. SMK

Secara umum, tujuan SMK Pusat Keunggulan adalah untuk menghasilkan lulusan yang terserap di dunia kerja atau menjadi wirausaha melalui keselarasan pendidikan vokasi yang mendalam dan menyeluruh dengan dunia kerja serta diharapkan menjadi pusat peningkatan kualitas dan rujukan bagi SMK lainnya.

Program Prioritas 3. SMK yang Mengembangkan Proyek Kreatif dan Kewirausahaan



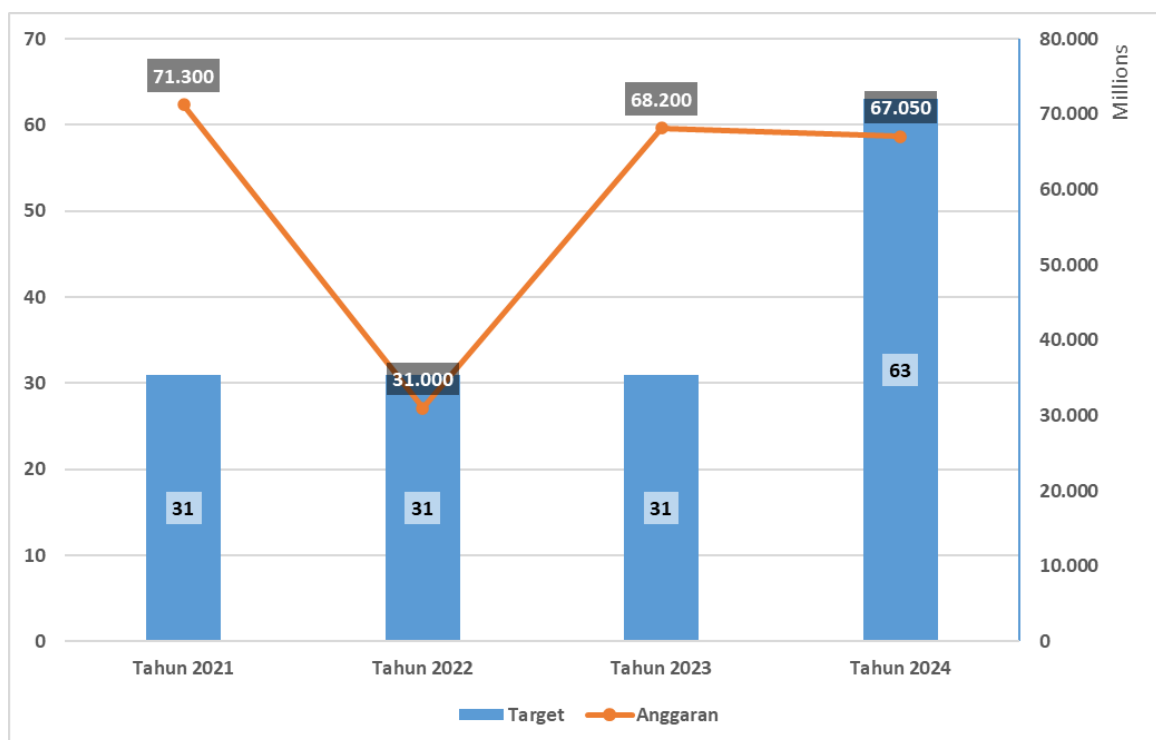
Gambar 2.3. Rencana Target dan Anggaran Prioritas 3 Dit. SMK

Program SMK yang Mengembangkan Produk Kreatif dan Kewirausahaan adalah upaya menjadikan sekolah sebagai lembaga pencetak lulusan yang mampu bersaing di dunia kerja dan menjadi wirausahawan muda.

Tujuan program ini adalah untuk mendorong kreativitas siswa dalam mengembangkan produk yang bernilai jual; meningkatkan jumlah siswa yang berwirausaha setelah lulus dari SMK; dan meningkatkan soft-skill lulusan SMK melalui pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan.

Program Prioritas 4. SMK yang Mengembangkan Proyek Kreatif dan Kewirausahaan

Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Industri 4.0 adalah bantuan yang diberikan dalam rangka pengembangan kompetensi keahlian SMK berbasis digitalisasi pada proses penguatan pembelajaran dan/atau pemenuhan peralatan praktik dan/atau pengembangan ruang praktik siswa berbasis industri 4.0.

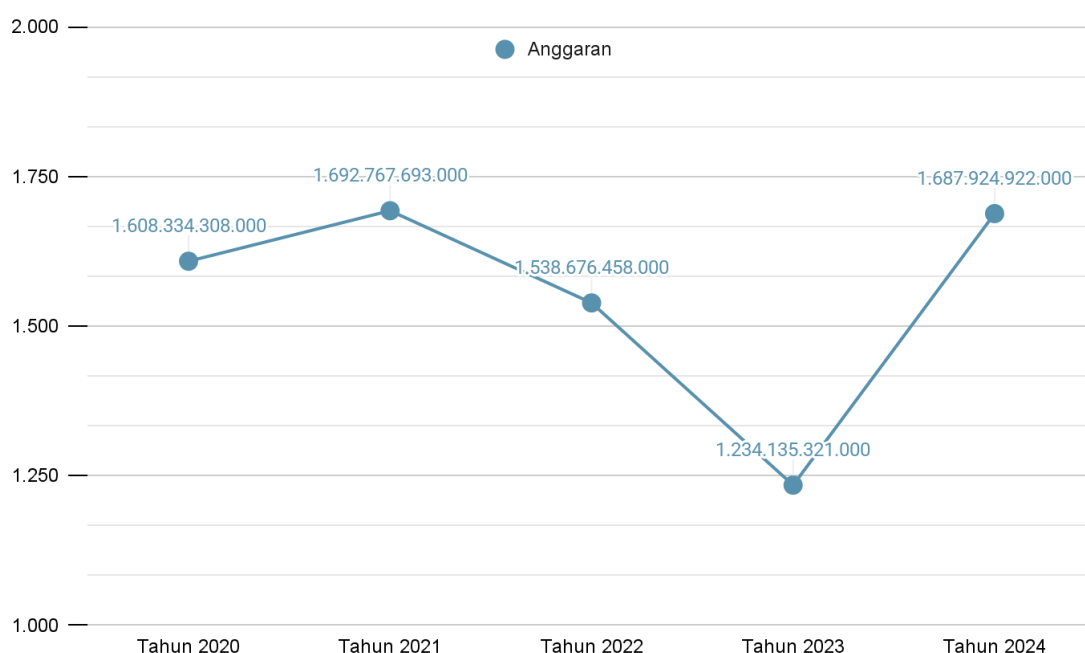


Gambar 2.4. Rencana Target dan Anggaran Prioritas 4 Dit. SMK

Tujuan pengembangan ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan melalui pemberian bantuan prasarana untuk menghasilkan lulusan SMK yang berkualitas sesuai dengan standar kebutuhan dunia kerja; membangun citra baru SMK dengan menciptakan proses pembelajaran praktik kejuruan yang berkualitas, sehingga dapat menjadi sekolah penggerak bagi pengembangan SMK lainnya; dan memberikan bekal bagi peserta didik SMK agar mempunyai keahlian yang berbasis Industri 4.0.

C. Rencana Kerja dan Anggaran

Sebagai pengguna anggaran negara, Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan telah menyusun rencana kerja dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terdapat beberapa indikator kinerja dengan target yang harus dicapai sesuai dengan kapasitas serta anggaran yang diberikan. Berikut tren alokasi anggaran belanja dari APBN tahun 2020-2024 yang diamanahkan pada Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan.



Gambar 2.5. Tren anggaran belanja pada Direktorat SMK tahun 2020-2024

Masa pembangunan RPJMN tahun 2020-2024 terdapat kebijakan yang mengarahkan agar dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya pemerintah pusat K/L termasuk Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan agar berfokus pada hal yang berkaitan dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria. Hal ini berakibat anggaran yang dikelola oleh Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan mengalami penurunan dibandingkan pada masa RPJMN tahun 2015-2019 dikarenakan anggaran untuk intervensi fisik semakin fokus diberikan melalui dana transfer daerah.

Anggaran untuk bantuan fisik yang tersisa pada Direktorat SMK hanya untuk program SMK yang Dikembangkan Menjadi Pusat Keunggulan dan program SMK yang Dikembangkan Berbasis Industri 4.0.

Sebanyak dua belas (12) rincian output menjadi pendukung untuk pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat SMK pada tahun 2024. Setiap IKK memiliki jumlah RO yang berbeda dan didukung dengan anggaran sesuai dengan kebutuhannya. Adapun rencana kerja dan anggaran Direktorat SMK adalah sebagai berikut.

Tabel 2.3. Rencana Kerja dan Anggaran Dit. SMK Tahun 2024

Uraian	Satuan	Target	Alokasi
[Satker] Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan			1.687.924.922.000
[Kegiatan] Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan			1.656.828.991.000
[SK 1] Meningkatnya kompetensi lulusan SMK yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja			
[IKK 1.1] Persentase lulusan SMK yang berhasil memperoleh kompetensi yang sesuai dengan dunia kerja	%	40,00	125.887.329.000
Siswa SMK yang Tersertifikasi Terhadap Kompetensi yang Relevan dengan Kebutuhan Dunia Kerja	Orang	125.000	73.651.649.000
Siswa SMK yang Mendapatkan Penguatan Persiapan Program Magang Luar Negeri	Orang	3.200	52.235.680.000
[SK 2] Meningkatnya relevansi pembelajaran SMK dengan kebutuhan dunia kerja			
[IKK 2.1] Persentase SMK yang menerapkan pembelajaran link and match dengan dunia kerja	%	48,00	1.530.941.662.000
SMK yang Dikembangkan Menjadi Pusat Keunggulan	Lembaga	1.340	1.118.932.440.000
SMK yang Melaksanakan Program UKS	Lembaga	72	3.705.800.000
SMK yang Mengembangkan Proyek Kreatif dan Kewirausahaan	Lembaga	240	14.090.000.000
SMK yang Dikembangkan Berbasis Industri 4.0	Lembaga	63	72.212.500.000
SMK yang Mendapatkan Pendampingan Peningkatan Mutu	Lembaga	72	41.254.192.000
SMK yang Mengembangkan Pengajaran Berbasis Pabrik (Teaching Factory)	Lembaga	315	280.746.730.000
[Kegiatan] Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi			31.095.931.000
[SK 3] Meningkatnya tata kelola Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan			
[IKK 3.1] Predikat SAKIP Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan	Predikat	BB	4.756.366.000
Layanan Umum	Layanan	1	4.756.366.000
[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan	Nilai	95,00	26.339.565.000
Layanan BMN	Dokumen	1	10.000.000
Layanan Perkantoran	Layanan	1	26.064.550.000
Layanan Sarana Internal	Unit	21	265.015.000

D. Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan menetapkan sasaran, indikator dan target selama lima tahun sebagai berikut.

Tabel 2.4. Target Renstra dan Perjanjian Kinerja Dit. SMK

Kode	Uraian	Satuan	Target Renstra			Target PK		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
1.0	<u>Sasaran Kegiatan</u> Meningkatnya kompetensi lulusan SMK yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja							
IKK 1.1	Persentase lulusan SMK yang berhasil memperoleh kompetensi yang sesuai dengan dunia kerja	%	33	36	40	33	36	40
2.0	<u>Sasaran Kegiatan</u> Meningkatnya relevansi pembelajaran SMK dengan kebutuhan dunia kerja							
IKK 2.1	Persentase SMK yang menerapkan pembelajaran link and match dengan dunia kerja	%	24	36	48	24	36	48
3.0	<u>Sasaran Kegiatan</u> Meningkatnya tata kelola Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan							
IKK 3.1	Predikat SAKIP Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB
IKK 3.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan	Nilai	92	93	95	92	93	94

Dalam rangka mencapai tujuan strategis, Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan menetapkan target tahunan yang akan dicapai, yaitu melalui perjanjian kinerja tahun 2024. Penetapan target perjanjian kinerja telah mempertimbangkan hasil evaluasi capaian tahun-tahun sebelumnya, target rencana strategis, serta ketersediaan alokasi anggaran, yang dilakukan melalui reviu rencana strategis.

Khusus untuk IKK 3.2, pada tahun 2024, target PK berbeda dengan target renstra dikarenakan capaian pada tahun 2023 di bawah target, sehingga target PK di tahun 2024 diturunkan nilainya dari target renstra.

Berikut ringkasan Perjanjian Kinerja Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan tahun 2024.

Tabel 2.5. Target SK dan IKK Perjanjian Kinerja Awal

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2024
[SK 1] Meningkatnya kompetensi lulusan SMK yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	[IKK 1.1] Persentase lulusan SMK yang berhasil memperoleh kompetensi yang sesuai dengan dunia kerja	40
[SK 2] Meningkatnya relevansi pembelajaran SMK dengan kebutuhan dunia kerja	[IKK 2.1] Persentase SMK yang menerapkan pembelajaran link and match dengan dunia kerja	48

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2024
[SK 3] Meningkatnya tata kelola Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan	[IKK 3.1] Predikat SAKIP Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan	BB
	[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan	94

Tabel 2.6. Anggaran SK dan IKK Perjanjian Kinerja Awal

Kode	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)
4261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi	31.151.130.000
4262	Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan	1.656.828.991.000
Total		1.687.980.121.000

Berikut ringkasan revisi Perjanjian Kinerja Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan tahun 2024. Revisi dilakukan karena adanya perubahan anggaran pada kegiatan 4261, perubahan pimpinan tingkat eselon I, perubahan pimpinan tingkat eselon II.

Tabel 2.7. Target SK dan IKK Perjanjian Kinerja Revisi

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2024
[SK 1] Meningkatnya kompetensi lulusan SMK yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	[IKK 1.1] Persentase lulusan SMK yang berhasil memperoleh kompetensi yang sesuai dengan dunia kerja	40
[SK 2] Meningkatnya relevansi pembelajaran SMK dengan kebutuhan dunia kerja	[IKK 2.1] Persentase SMK yang menerapkan pembelajaran link and match dengan dunia kerja	48
[SK 3] Meningkatnya tata kelola Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan	[IKK 3.1] Predikat SAKIP Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan	BB
	[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan	94

Tabel 2.8. Anggaran SK dan IKK Perjanjian Kinerja Revisi

Kode	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)
4261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi	31.095.931.000
4262	Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan	1.656.828.991.000
Total		1.687.924.922.000

Pada tahun 2024, Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan melakukan penyesuaian anggaran pada Perjanjian Kinerja melalui revisi Perjanjian Kinerja tahun 2024. Hal tersebut dikarenakan adanya:

1. Revisi DIPA terkait Blokir/Buka Blokir
2. Revisi terkait penambahan belanja pegawai

Penyesuaian alokasi anggaran pada Perjanjian Kinerja dari anggaran sebesar Rp1.687.980.121.000 menjadi Rp1.687.924.922.000.

BAB III - Akuntabilitas Kinerja

A. Akuntabilitas Kinerja

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2024, Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan menetapkan tiga sasaran kegiatan dengan empat indikator kinerja kegiatan. Berikut informasi tingkat ketercapaiannya selama tahun 2024.

Tabel 3.1. Target dan Capaian Kinerja Dit. SMK Tahun 2024

Uraian	Satuan	Target	Capaian	%
<u>Sasaran Kegiatan 1</u> Meningkatnya kompetensi lulusan SMK yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja				
[IKK 1.1] Persentase lulusan SMK yang berhasil memperoleh kompetensi yang sesuai dengan dunia kerja	%	40,00	49,53	123,83
<u>Sasaran Kegiatan 2</u> Meningkatnya relevansi pembelajaran SMK dengan kebutuhan dunia kerja				
[IKK 2.1] Persentase SMK yang menerapkan pembelajaran link and match dengan dunia kerja	%	48,00		
<u>Sasaran Kegiatan 3</u> Meningkatnya tata kelola Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan				
[IKK 3.1] Predikat SAKIP Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan	Predikat	BB	A	100,63
[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA K/L Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan	Nilai	94,00	97,63	102,77

1. Sasaran Kegiatan 1

Meningkatnya Kompetensi Lulusan SMK yang Sesuai dengan Kebutuhan Dunia Kerja

Peningkatan kebutuhan dunia kerja terhadap lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan program-program yang dijalankan oleh berbagai pihak, termasuk Direktorat SMK, dalam pengembangan pendidikan SMK. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, berbagai program telah diimplementasikan dengan tujuan meningkatkan kompetensi lulusan SMK agar sesuai dengan tuntutan dunia kerja saat ini.

Kompetensi, menurut SK Mendiknas Nomor 045/U/2002, didefinisikan sebagai seperangkat tindakan cerdas dan bertanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Sementara itu, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) mendefinisikan kompetensi yang sesuai dengan dunia kerja adalah sebagai uraian kemampuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja minimal yang harus dimiliki seseorang untuk menduduki jabatan tertentu yang berlaku secara nasional.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kerja sama dan peran industri dalam pendidikan SMK, termasuk pengembangan insentif dan regulasi. Koordinasi intensif dengan industri juga dilakukan untuk memetakan kebutuhan keahlian dan memperkuat informasi pasar kerja di setiap wilayah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa lulusan SMK memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja.

Salah satu hal yang menjadi landasan apakah lulusan SMK sesuai dengan kebutuhan dunia kerja yaitu melakukan pengukuran dan pengujian terhadap kompetensi lulusan itu sendiri yang juga merupakan salah satu kegiatan Direktorat SMK yang tertuang pada indikator kegiatan berikut.

a. Indikator Kinerja Kegiatan 1.1 - Persentase lulusan SMK yang Berhasil Memperoleh Kompetensi yang Sesuai dengan Dunia Kerja

Tolak ukur keberhasilan SMK salah satunya diukur dari jumlah lulusannya yang dapat diterima di dunia kerja. Salah satu strategi agar lulusan SMK dapat diterima di dunia kerja siswa SMK perlu dibekali kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Salah satu indikator siswa telah kompeten bisa dilihat dari pengakuan Dunia Kerja/Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) terhadap kompetensi siswa tersebut melalui pemberian sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat keikutsertaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dari dunia industri yang diakui.

Pelaksanaan sertifikasi terhadap siswa merupakan bagian dari evaluasi pembelajaran sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang SNP SMK/MAK pada Lampiran IV tentang Standar Penilaian.

Metode penghitungan capaian IKK 1.1 adalah sebagai berikut:

$$I = \frac{A}{B} \times 100\%$$

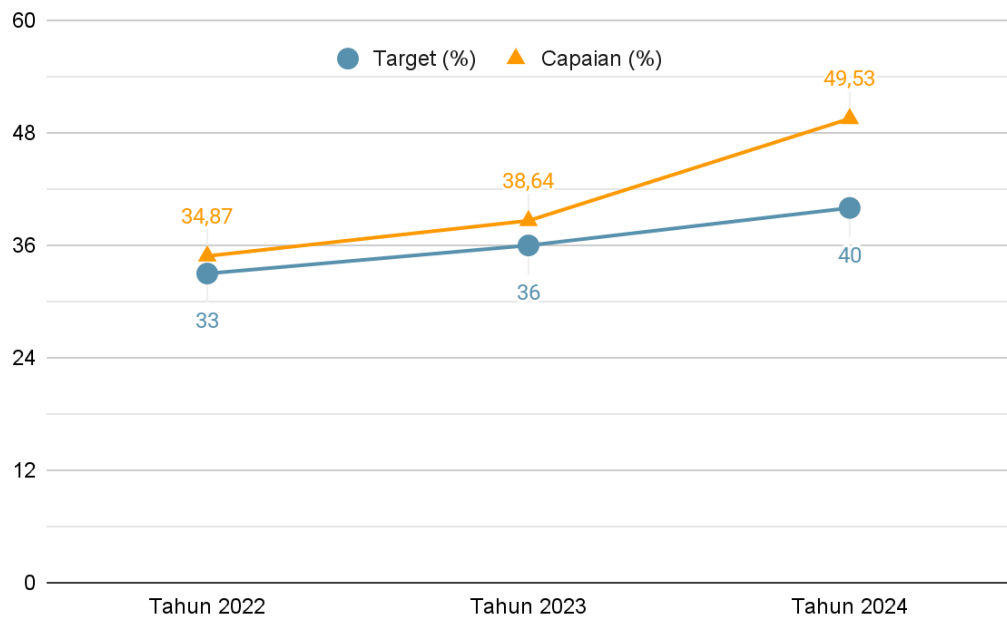
Keterangan:

I = Persentase lulusan SMK yang berhasil memperoleh kompetensi yang sesuai dengan dunia kerja

A = Jumlah peserta didik SMK kelas 12/13 tersertifikasi kompetensi dari LSP dan/atau sertifikasi PKL dari dunia industri yang diakui

B = Jumlah populasi peserta didik SMK kelas 12/13

IKK 1.1 sudah dilaksanakan sejak tahun 2022 sesuai yang tercantum dengan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. Berikut capaiannya dari tahun 2022 sampai tahun 2024.



Gambar 3.1. Tren Capaian IKK 1.1 dari Tahun 2022 s.d. 2024

Capaian pada tahun 2024 dihitung berdasarkan jumlah peserta didik kelas 12/13 yang telah melakukan PKL dari Sekolah Menengah Kejuruan yang mendapatkan bantuan program SMK yang Dikembangkan Menjadi Pusat Keunggulan. Ini mencakup penerima yang telah menerima bantuan selama tiga tahun berturut-turut atau yang sedang menerima bantuan pada tahun 2024. Selain itu, capaian juga mencakup peserta didik kelas 12/13 yang telah melakukan PKL SMK yang Dikembangkan Berbasis Industri 4.0, serta intervensi bantuan sertifikasi kompetensi dari Direktorat SMK.

Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) per Desember 2024, jumlah peserta didik kelas 12/13 untuk SMK Pusat Keunggulan adalah 706.284 orang, sedangkan untuk SMK yang Dikembangkan Berbasis Industri 4.0 adalah 15.472 orang. Dari 101.198 peserta didik yang mendapatkan bantuan, hanya 87.217 orang yang dihitung karena terjadi duplikasi dari dua jenis bantuan yang juga menjadi penghitung capaian IKK ini.

Dengan demikian, total jumlah peserta didik yang dihitung adalah 808.973 orang. Jika dibandingkan dengan jumlah populasi peserta didik SMK kelas 12/13 per Desember 2024 yang sebanyak 1.633.450 orang, persentase capaian IKK 1.1 adalah sebesar 49,53%. Ini menunjukkan bahwa target telah tercapai.

Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 1.1

Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target 2024	Capaian 2024	%
Persentase lulusan SMK yang berhasil memperoleh kompetensi yang sesuai dengan dunia kerja	38,64	40,00	49,53	123,83

Beberapa kegiatan lainnya yang juga mendukung agar kompetensi lulusan SMK sesuai dengan kebutuhan dunia kerja di antaranya:

- 1) Telah dilakukan penyusunan pedoman magang/PKL siswa yang merupakan bagian dari pembelajaran agar semua lulusan SMK memperoleh kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
- 2) Telah dilaksanakannya bantuan terkait kegiatan sertifikasi bahasa asing kepada 42.395 orang peserta didik baik untuk bahasa Inggris maupun bahasa asing lainnya.
- 3) Telah dilaksanakan bantuan terkait persiapan siswa program magang luar negeri kepada 3.639 orang. Bantuan ini termasuk di dalamnya adalah sertifikasi bahasa negara yang akan dituju serta pengenalan budaya kerja negara tujuan.



Gambar 3.2. Pelaksanaan Serkom di SMK Muhammadiyah Harumansari

Adapun kendala yang dihadapi adalah:

- 1) Mitra Industri pada SMK Pusat Keunggulan beberapa belum mempunyai lembaga sertifikasi secara mandiri untuk melaksanakan proses sertifikasi kepada siswa SMK.
- 2) Sementara untuk sertifikasi kepada Siswa SMK terkendala pada belum banyaknya lembaga/institusi yang melakukan sertifikasi pada bidang-bidang tertentu sebagai bentuk peningkatan Kompetensi yang Relevan dengan Kebutuhan Dunia Kerja.
- 3) Lembaga sertifikasi LSP-P1 SMK belum tersebar menyeluruh secara nasional, sehingga sebagian besar siswa yang berada di daerah belum dapat terjangkau untuk mendapatkan sertifikasi.

Tindak lanjut terkait kendala yang dihadapi adalah:

- 1) Mendorong kepada SMK untuk melakukan pemetaan lokasi sertifikasi yang diakui untuk setiap kompetensi yang ada di sekolah masing-masing dan melakukan sertifikasi kepada setiap lulusan.

- 2) Mendorong kepada SMK agar terus mempersiapkan siswa yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja bersama dengan melibatkan mitra industri terutama dalam hal proses pembelajaran, seperti penyusunan kurikulum, pembelajaran berbasis proyek riil, peningkatan peran guru/instruktur dari industri, dan praktik kerja lapangan.

Strategi yang dapat dilakukan ke depan terkait dengan sertifikasi lulusan SMK adalah dengan melibatkan dunia kerja terutama industri mitra untuk dapat memberikan pelatihan yang bersertifikat kepada siswa sehingga bentuk perolehan kompetensi sesuai dengan bidangnya. Selain itu, rencana yang sudah ada terus dipantau perkembangannya sehingga diharapkan kegiatan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Serta, mendorong dinas pendidikan daerah untuk melakukan pembinaan dalam pendirian LSP-P1 di SMK sehingga pelaksanaan sertifikasi dalam tercapai merata secara nasional.

2. Sasaran Kegiatan 2

Meningkatnya Relevansi Pembelajaran SMK dengan Kebutuhan Dunia Kerja

Berbagai program di SMK dirancang untuk mempersiapkan siswa sesuai dengan perkembangan industri. Kegiatan ini diselaraskan dengan kebutuhan dunia kerja, memastikan bahwa apa yang dipelajari siswa relevan dan berharga di tempat kerja.

Banyak hal yang bisa dilakukan untuk memenuhinya seperti penyelarasan kurikulum, guru tamu, pembelajaran berbasis pabrik (teaching factory), dan seterusnya. Semua kegiatan itu merupakan bagian dari 8+i link and match.

a. Indikator Kinerja Kegiatan 2.1 - Persentase SMK yang Menerapkan Pembelajaran Link and Match dengan Dunia Kerja

Link and Match merupakan konsep untuk menyelaraskan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha. Dalam hal ini, link and match biasanya berhubungan dengan pembelajaran untuk mempersiapkan lulusan SMK sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Konsep utama link and match dilakukan melalui keterlibatan dan kemitraan dunia kerja di segala aspek penyelenggaraan pendidikan kejuruan, dengan memperhatikan paket 8+i link and match (Kepmendikbudristek nomor 464/M/2022), meliputi:

- 1) Penyusunan dan penyelarasan kurikulum berbasis industri dan dunia kerja;
- 2) Pembelajaran berbasis proyek nyata (produk barang/jasa) dari dunia kerja (PBL) sejak awal;
- 3) Pelibatan guru/pengajar tamu expert dari industri atau dunia kerja ditingkatkan secara signifikan;
- 4) Penyelenggaraan magang/praktik kerja industri (Prakerin) minimal 1 semester;
- 5) Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi yang diakui oleh industri dan dunia kerja bagi lulusan;

- 6) Pelatihan Guru/pengajar secara rutin mendapatkan update teknologi dan training dari dunia kerja;
- 7) Pembuatan komitmen dengan dunia kerja terhadap penyerapan lulusan SMK;
- 8) Pemberian Beasiswa dan/atau Ikatan Dinas dari dunia kerja untuk siswa SMK serta donasi dari DUDI dalam bentuk peralatan laboratorium, atau dalam bentuk lainnya, bagi pendidikan vokasi; dan
- 9) Riset Terapan yang bermula dari kasus atau kebutuhan nyata di DUDI dan masyarakat.

SMK dikategorikan link and match dengan dunia kerja ketika memenuhi minimal 4 aspek dari 8+i aspek yang telah tertuang dalam Kepmendikbud.

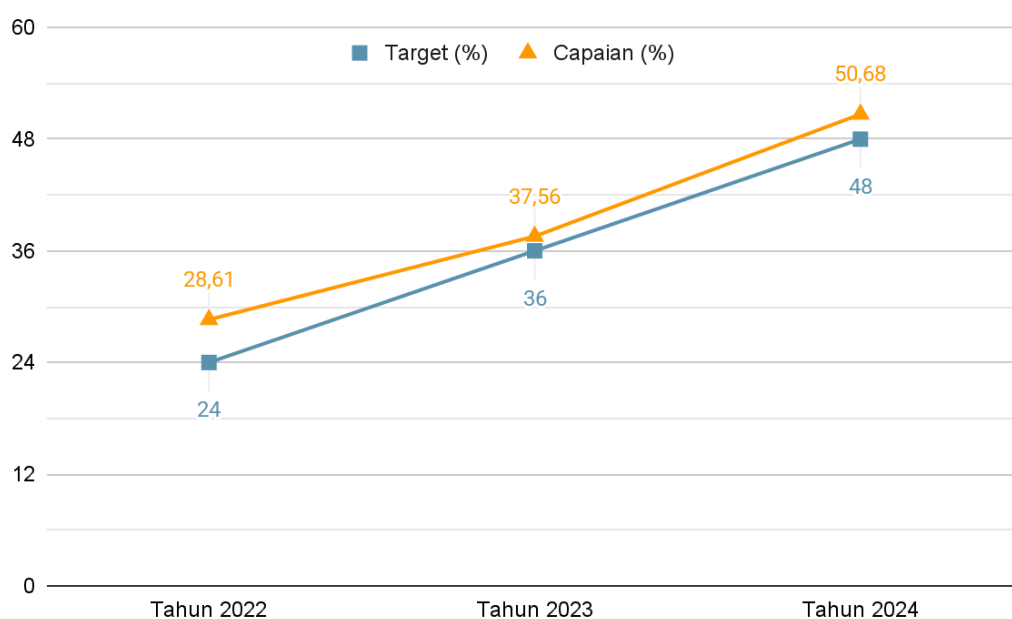
Metode penghitungan capaian IKK 2.1 adalah sebagai berikut:

$$I = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

I = Persentase SMK yang menerapkan pembelajaran *link and match* dengan dunia kerja
A = Jumlah SMK yang sudah melakukan pembelajaran *link and match* dengan dunia kerja
B = Jumlah total SMK

IKK 2.1 sudah dilaksanakan sejak tahun 2022 sesuai yang tercantum dengan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. Berikut capaiannya dari tahun 2022 sampai tahun 2024.



Gambar 3.3. Tren Capaian IKK 2.1 dari Tahun 2022 s.d. 2024

Capaian IKK 2.1 pada tahun 2024 diperoleh dari hasil asesmen nasional tahun 2024 melihat pada indikator D.17 - Link and Match Dengan Dunia Kerja. Capaian pada indikator tersebut dibagi menjadi ke dalam tiga kategori berdasarkan nilai yang diperoleh oleh SMK yaitu baik, sedang, dan kurang.

Jumlah SMK yang dihitung untuk memenuhi capaian IKK 2.1 adalah SMK yang masuk ke dalam kategori baik dan sedang. Seluruh SMK pada kategori baik dihitung yaitu sebanyak 4.900 SMK, sedangkan jumlah SMK yang dihitung pada kategori sedang adalah koefisien atas kategori sedang yaitu sepertiga teratas atau sebanyak 2.410 SMK. Sehingga totalnya adalah 7.310 SMK.

Jumlah SMK keseluruhan berdasarkan Dapodik per Desember 2024 adalah 14.425 SMK. Menggunakan cara penghitungan capaian sesuai definisi operasional, maka 7.310 SMK adalah sebesar 50,68% dari 14.425 SMK.

Tabel 3.3. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 2.1

Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target 2024	Capaian 2024	%
Persentase SMK yang menerapkan pembelajaran <i>link and match</i> dengan dunia kerja	37,56	48,00	50,68	105,57

Dalam mendukung ketercapaian indikator kinerja tersebut di atas beberapa program, di antaranya:

- 1) SMK yang Mengembangkan Proyek Produk Kreatif dan Kewirausahaan telah dilakukan kegiatan berupa koordinasi awal dalam rangka perencanaan pelaksanaan kegiatan dan telah disusun dan diajukannya petunjuk teknis bantuan pemerintah terkait kegiatan, serta sebanyak 240 SMK telah ditetapkan.
- 2) SMK yang dikembangkan menjadi Pusat Keunggulan berupa penerbitan juknis bantuan pemerintah SMK PK Tahun 2024. Pelaksanaan seleksi SMK PK Tahun 2024 mulai dari pembukaan pengajuan SMK PK tahun 2024 oleh SMK hingga proses seleksi dan penentuan serta pengajuan untuk pembuatan SK penetapan sebanyak 1.851 SMK.
- 3) SMK yang Dikembangkan Berbasis Industri 4.0 kepada sebanyak 80 SMK yang terdiri dari SMK yang baru pertama kali mengikuti program dan SMK yang sudah pernah mendapatkan di tahun sebelumnya.



Gambar 3.4. Hasil Bantuan Fisik SMK Berbasis Industri 4.0

- 4) Sosialisasi kebijakan kepada SMK terkait mendatangkan guru tamu/instruktur dari industri yang juga difasilitasi melalui dana BOS, penyesuaian kurikulum agar pembelajaran sesuai kebutuhan dunia kerja, penempatan guru ke dunia kerja serta pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) yang diharapkan melibatkan industri merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian indikator kinerja.

Untuk mencapai target dari IKK ini, tidak lepas dari kendala dan tantangan yang dihadapi di antaranya:

- 1) Pada SMK yang Mengembangkan Proyek Produk Kreatif dan Kewirausahaan kendala yang dihadapi berupa mitra dunia kerja yang beberapa mengalami penurunan operasional sehingga program yang diagendakan tidak dapat berjalan sesuai rencana.
- 2) Pelaksanaan program SMK yang dikembangkan menjadi Pusat Keunggulan kendala terkait terbitnya SK Penetapan SMK PK yang sedikit terlambat sehingga pelaksanaan oleh sekolah sedikit terlambat, sementara itu untuk banyaknya intervensi dari beberapa pihak terhadap SMK PK mengakibatkan tim sekolah kesulitan membagi SDM untuk mengikutinya.
- 3) SMK yang Dikembangkan Berbasis Industri 4.0 kendala yang dihadapi beberapa sekolah dikarenakan beberapa industri yang mendukung berlokasi cukup jauh dari sekolah sehingga koordinasinya belum maksimal.

Dalam menghadapi kendala dan tantangan tersebut Direktorat SMK mengambil langkah sebagai berikut:

- 1) SMK yang Mengembangkan Proyek Produk Kreatif dan Kewirausahaan Rencana yang sudah ada terus dipantau perkembangannya sehingga diharapkan kegiatan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
- 2) SMK yang dikembangkan menjadi Pusat Keunggulan Rencana yang sudah ada terus dipantau perkembangannya sehingga diharapkan kegiatan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

- 3) SMK yang Dikembangkan Berbasis Industri 4.0 Rencana yang sudah ada terus dipantau perkembangannya sehingga diharapkan kegiatan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Strategi yang bisa dilakukan kedepan untuk meningkatkan SMK yang menerapkan link and match adalah dengan melibatkan semua stakeholder, dalam hal ini adalah SMK; dinas pendidikan; dunia kerja; dan Kemendikbudristek, untuk melakukan koordinasi secara terus menerus sehingga pengembangan SMK dapat secara menyeluruh dan sesuai dengan tujuan dari adanya SMK itu sendiri.

3. Sasaran Kegiatan 3

Meningkatnya Tata Kelola Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan

Keterbukaan informasi dan transparansi publik menjadi hal yang sangat krusial, terbukti dengan semakin kritisnya masyarakat menanggapi berbagai informasi yang masuk dan usaha-usaha untuk mendapatkan informasi yang transparan. Hal-hal ini dapat dijadikan indeks penilaian dalam tata kelola pemerintahan. Sehingga untuk mengimbangi kesadaran masyarakat ini, pemerintah kemudian mulai mengembangkan berbagai cara agar aksesibilitas informasi dapat lebih mudah dinikmati oleh semua kalangan masyarakat untuk menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan sudah semakin baik.

Pada SK 3 terdapat dua IKK yaitu IKK 3.1 Predikat SAKIP Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan dan IKK 3.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan.

a. Indikator Kinerja Kegiatan 3.1 - Predikat SAKIP Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan

Akuntabilitas kinerja adalah bagian dari delapan program Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Ini diterapkan di semua instansi pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Proses ini melibatkan perencanaan, pengukuran, pengelolaan data, pelaporan, dan evaluasi kinerja pada berbagai tingkatan organisasi.

Evaluasi atas penerapan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government).

Pelaksanaan Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

$$\text{Nilai SAKIP} = [\text{Perencanaan Kinerja}] + [\text{Pengukuran kinerja}] + [\text{Pelaporan Kinerja}] + [\text{Evaluasi Kinerja}]$$

IKK 3.1 adalah IKK yang berkaitan dengan penilaian SAKIP pada satuan kerja. Setiap tahunnya, sejak tahun 2020 sampai tahun 2024, IKK terkait SAKIP ini sudah muncul dan dilakukan penilaian. Berikut target dan capaian nilai SAKIP Dit. SMK setiap tahunnya.

Tabel 3.4. Predikat Sakip Dit. SMK dari Tahun 2020 s.d. 2024

Tahun	Target	Capaian
2020	BB	A
2021	BB	BB
2022	BB	BB
2023	BB	BB
2024	BB	A

Nilai SAKIP Direktorat SMK pada tahun ini adalah 80,50 dengan predikat A interpretasi memuaskan. Secara predikat, nilai SAKIP Direktorat SMK meningkat dari tahun lalu. Perbandingan keduanya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 3.1

Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target 2024	Capaian 2024	%
Predikat SAKIP Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan	BB	BB	A	100,63

Keberhasilan capaian dari IKK 3.1 disebabkan beberapa faktor yaitu:

- 1) Penguatan koordinasi secara rutin sehingga ketercapaian nilai SAKIP dapat terpantau serta melakukan administrasi secara teratur dan berkala untuk mengetahui proses pelaksanaan kegiatan pendukung SAKIP;
- 2) Merencanakan pola kegiatan pemenuhan dan perbaikan dokumen SAKIP menyesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan dari pihak yang berkepentingan.

Pada upaya pencapaian target IKK ini, masih ada terdapat kendala yaitu belum semua dokumen penilaian SAKIP dapat terpenuhi dengan baik hingga batas waktu akhir

pelaksanaan penilaian AKIP mandiri. Dokumen tersebut di antaranya adalah dokumen kepegawaian, dokumen *reward and punishment*, serta dokumentasi pelaksanaan pelaporan dan evaluasi.

Hal yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut adalah berkoordinasi dengan berbagai pihak, terutama pimpinan, sehingga bisa memenuhi dokumen tersebut. dokumen-dokumen tersebut disampaikan kepada tim pemeriksa SAKIP pada saat melakukan sanggah.

Strategi yang bisa dilakukan ke depan adalah:

- 1) Melakukan koordinasi terkait pembentukan Tim SAKIP dengan pimpinan sehingga pelaksanaan program sesuai dengan target kinerja dan diharapkan tahun berikutnya bisa dibentuk.
- 2) Melakukan koordinasi dengan unsur terkait di dalam Direktorat SMK untuk menindaklanjuti catatan dan rekomendasi yang pada LHE.

b. Indikator Kinerja Kegiatan 3.2 - Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan

Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Berdasarkan PMK Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

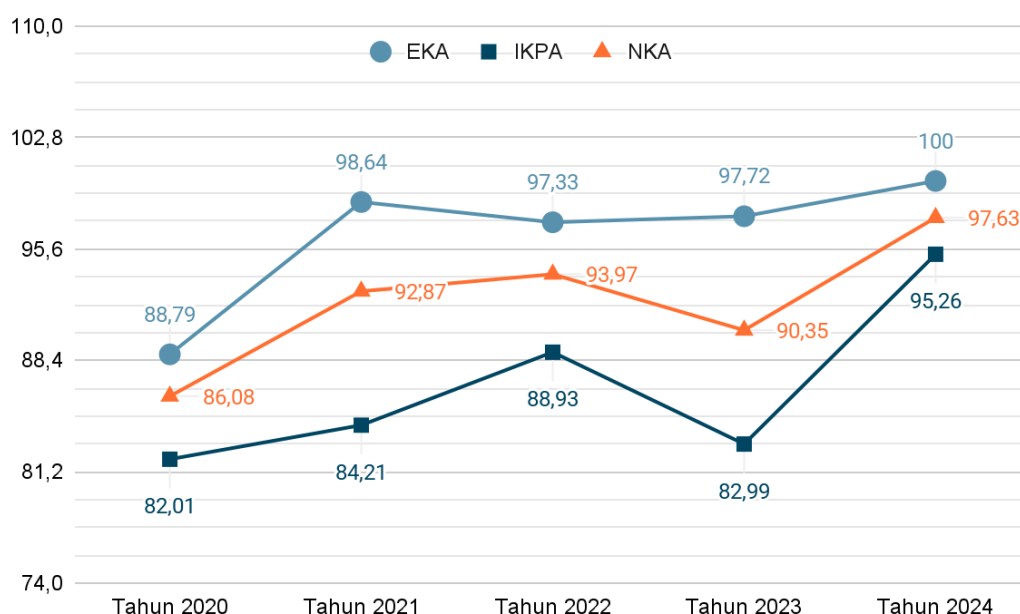
Metode Penghitungan:

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran}^* = [50\% \times \text{Nilai EKA}] + [50\% \times \text{Nilai IKPA}]$$

**Metode penghitungan tersebut di atas mulai berlaku sejak tahun 2023*

*** Metode penghitungan tahun 2020 s.d. 2022 adalah NKA = (60% x EKA) + (40% x IKPA)*

IKK 3.2 adalah IKK yang berkaitan dengan nilai kinerja anggaran atau NKA pada satuan kerja. Setiap tahunnya, sejak tahun 2020 sampai tahun 2024, IKK terkait NKA ini sudah muncul dan dilakukan penilaian. Berikut capaian NKA Dit. SMK setiap tahunnya.



Gambar 3.5. Tren Capaian IKK 3.2 dari Tahun 2020 s.d. 2024

Berdasarkan aplikasi Monev Kemenkeu per tanggal 27 Januari 2025, Nilai akhir EKA dan IKPA Direktorat SMK masing-masing adalah 100,00 dan 95,26. Menggunakan nilai tersebut, menggunakan metode penghitungan NKA, diperoleh NKA Direktorat SMK sebesar 97,63. Dibandingkan dengan target dengan nilai 95,00, persentase capaian IKK 3.2 adalah 102,77%.

Tabel 3.6. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 3.2

Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target 2024	Capaian 2024	%
Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan	90,35	95,00	97,63	102,77

Capaian IKK ini pada tahun 2024 mengalami kenaikan yang cukup tinggi dibandingkan dengan capaian tahun tahun lalu. Faktor tercapainya keberhasilan tersebut adalah berhasilnya pelaksanaan penggunaan SBK, tercapainya semua target pada *output*, serta baiknya pengelolaan UP dan TUP.

Beberapa kendala penyebab capaian NKA menjadi rendah antara lain:

- 1) Pada Kualitas Perencanaan Anggaran diketahui bahwa kesesuaian dan konsistensi antara pelaksanaan anggaran dengan rencana penggunaan yang ditetapkan dalam DIPA masih terdapat deviasi yang cukup tinggi. Di antaranya untuk RPD pada

halaman III DIPA yang disusun belum dilakukan pemantauan dan evaluasi rutin untuk menghindari adanya penyimpangan dari target yang telah ditetapkan, sehingga satker terlambat untuk melakukan revisi halaman III DIPA setiap awal triwulan.

- 2) Realisasi anggaran yang ditetapkan dalam DIPA bergantung pada pihak lain yang menjadi penerima manfaat. Hal ini mempengaruhi beberapa komponen diantaranya Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, dan Pengelolaan UP/TUP yang dalam pelaksanaannya tidak dapat diselesaikan sesuai tenggat waktu dalam pengelolaan administrasi dokumennya.

Ada pun tindak lanjut yang dilakukan dalam menghadapi kendala tersebut adalah dengan terus menerus melakukan pemantauan dan evaluasi oleh pengambil keputusan, tim perencana, dan tim keuangan terkait proses penyelesaian anggaran terhadap kegiatan sehingga konsistensi penyerapan dan realisasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

Berikut beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk selanjutnya, yaitu:

- 1) Penyerapan Anggaran: Memastikan bahwa anggaran yang telah direncanakan dapat diserap dalam periode triwulanan.
- 2) Meningkatkan Koordinasi dan Kerja sama: Kerja sama dan koordinasi yang baik dilakukan terutama untuk memastikan bahwa semua proses pelayanan dan pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana.
- 3) Menggunakan Teknologi Pemantauan dan Evaluasi: Memaksimalkan penggunaan aplikasi seperti SAKTI dan MoLK untuk memantau pelaksanaan anggaran di dalam satuan kerja.

B. Capaian Program/Agenda Prioritas

Direktorat SMK memiliki empat program prioritas yang setiap tahun juga menjadi prioritas nasional. Program prioritas ini sekaligus menjadi program prioritas Direktorat SMK yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja Direktorat SMK. Ada pun program-program prioritas tersebut adalah sebagai berikut.

1. Siswa SMK yang Tersertifikasi Terhadap Kompetensi yang Relevan dengan Kebutuhan Dunia Kerja

Sertifikasi yang diberikan ditargetkan adalah bagi peserta didik yang akan lulus sehingga sertifikat tersebut bisa digunakan oleh lulusan sebagai pegangan untuk melamar kerja. Sertifikasi yang diberikan adalah sertifikasi kompetensi, sertifikasi bahasa Inggris, dan sertifikasi bahasa asing non bahasa Inggris.

Berikut capaian Siswa SMK yang Tersertifikasi Terhadap Kompetensi yang Relevan dengan Kebutuhan Dunia Kerja.

Tabel 3.7. Capaian Program Siswa Tersertifikasi

Program	Capaian				
	2020	2021	2022	2023	2024
Siswa SMK yang Tersertifikasi Terhadap Kompetensi yang Relevan dengan Kebutuhan Dunia Kerja (Satuan: Orang)	138.200	92.650	46.891	46.960	143.593

Capaian ini setiap tahunnya dipengaruhi oleh jumlah anggaran yang ada dan harga satuan untuk setiap siswa yang akan diikuti.

2. SMK yang Dikembangkan Menjadi Pusat Keunggulan

Pada tahun 2020 program ini lebih dikenal dengan program SMK Pusat Keunggulan (Center Of Excellence). Untuk tahun-tahun setelah itu, mengikuti arahan kebijakan, penyebutan *Center Of Excellence* dihilangkan menyisakan penyebutan SMK Pusat Keunggulan. Berikut capaian SMK yang Dikembangkan Menjadi Pusat Keunggulan.

Tabel 3.8. Capaian Program SMK Pusat Keunggulan

Program	Capaian				
	2020	2021	2022	2023	2024
SMK yang Dikembangkan Menjadi Pusat Keunggulan (Satuan: Lembaga)	491	901	1.401	1.851	1.478

Capaian untuk SMK PK juga termasuk di dalamnya adalah SMK PK baru, SMK PK lanjutan, dan SMK PK Skema Pemadanan Dukungan.

3. SMK yang Mengembangkan Proyek Kreatif dan Kewirausahaan

Sekolah membentuk kelompok usaha kecil dimodali dengan dana bantuan. Kelompok yang melakukan usaha diharapkan dapat mengembalikan modalnya ke sekolah yang kemudian sekolah menggulirkan kembali modal tersebut kepada kelompok usaha siswa yang lain.

Tabel 3.9. Capaian Program Proyek Kreatif dan Kewirausahaan

Program	Capaian				
	2020	2021	2022	2023	2024
SMK yang Mengembangkan Proyek Kreatif dan Kewirausahaan (Satuan: Lembaga)	253	220	100	240	240

Khusus pada tahun 2020, capaian pada program ini termasuk juga SMK yang Melakukan Pameran Hasil Karya Peserta Didik dan StartUp Bisnis.

4. SMK yang Dikembangkan Berbasis Industri 4.0

Program pengembangan SMK berbasis Industri 4.0 adalah upaya dalam hal menyambut gelombang Industri 4.0. Program ini baru dimulai pada tahun 2021 sehingga capaian untuk tahun 2020 belum ada. Berikut capaian program pengembangan SMK 4.0.

Tabel 3.10. Capaian Program SMK 4.0

Program	Capaian				
	2020	2021	2022	2023	2024
SMK yang Dikembangkan Berbasis Industri 4.0 (Satuan: Lembaga)	-	31	56	80	63

Capaian tersebut termasuk di dalamnya adalah SMK 4.0 baru, SMK 4.0 lanjutan, dan SMK PK Skema Pemadanan Dukungan.

C. Realisasi Anggaran

1. Capaian Anggaran

Pagu anggaran Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan dalam DIPA tahun 2024 sebesar Rp1.687.924.922.000. Dari pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar Rp1.667.881.998.980 dengan persentase daya serap sebesar 98,81%.

Pagu sebesar tersebut di atas digunakan untuk membiayai pencapaian dua sasaran kinerja dengan empat indikator kinerja kegiatan. Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-masing sasaran/indikator kinerja.

Tabel 3.11. Penyerapan Anggaran Dit. SMK

Uraian	Alokasi	Realisasi	%
[Satker] Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan	1.687.924.922.000	1.667.881.998.980	98,81
[Kegiatan] Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan	1.656.828.991.000	1.638.615.150.078	98,90
[SK 1] Meningkatnya kompetensi lulusan SMK yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja			
[IKK 1.1] Persentase lulusan SMK yang berhasil memperoleh kompetensi yang sesuai dengan dunia kerja	125.887.329.000	124.219.999.397	98,68
Siswa SMK yang Tersertifikasi Terhadap Kompetensi yang Relevan dengan Kebutuhan Dunia Kerja	73.651.649.000	73.111.506.490	99,27

Uraian	Alokasi	Realisasi	%
Siswa SMK yang Mendapatkan Penguatan Persiapan Program Magang Luar Negeri	52.235.680.000	51.108.492.907	97,84
[SK 2] Meningkatnya relevansi pembelajaran SMK dengan kebutuhan dunia kerja			
[IKK 2.1] Persentase SMK yang menerapkan pembelajaran link and match dengan dunia kerja	1.530.941.662.000	1.514.395.150.681	98,92
SMK yang Dikembangkan Menjadi Pusat Keunggulan	1.118.932.440.000	1.107.051.225.358	98,94
SMK yang Melaksanakan Program UKS	3.705.800.000	3.697.698.977	99,78
SMK yang Mengembangkan Proyek Kreatif dan Kewirausahaan	14.090.000.000	13.780.472.978	97,80
SMK yang Dikembangkan Berbasis Industri 4.0	72.212.500.000	71.705.819.448	99,30
SMK yang Mendapatkan Pendampingan Peningkatan Mutu	41.254.192.000	37.882.892.646	91,83
SMK yang Mengembangkan Pengajaran Berbasis Pabrik (Teaching Factory)	280.746.730.000	280.277.041.274	99,83
[Kegiatan] Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi	31.095.931.000	29.266.848.902	94,12
[SK 3] Meningkatnya tata kelola Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan			
[IKK 3.1] Predikat SAKIP Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan	4.756.366.000	4.423.455.194	93,00
Layanan Umum	4.756.366.000	4.423.455.194	93,00
[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan	26.339.565.000	24.843.393.708	94,32
Layanan BMN	10.000.000	8.000.000	80,00
Layanan Perkantoran	26.064.550.000	24.570.382.908	94,27
Layanan Sarana Internal	265.015.000	265.010.800	100,00

Sumber: MoLK per tanggal 27 Januari 2025

Adapun untuk capaian kegiatan dari setiap realisasi anggaran kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.12. Capaian Kegiatan Dit. SMK

Uraian	Satuan	Target	Capaian	%
[SK 1] Meningkatnya kompetensi lulusan SMK yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja				
[IKK 1.1] Persentase lulusan SMK yang berhasil memperoleh kompetensi yang sesuai dengan dunia kerja	%	40,00	49,53	123,83
Siswa SMK yang Tersertifikasi Terhadap Kompetensi yang Relevan dengan Kebutuhan Dunia Kerja	Orang	125.000	143.593	114,87

Uraian	Satuan	Target	Capaian	%
Siswa SMK yang Mendapatkan Penguatan Persiapan Program Magang Luar Negeri	Orang	3.200	3.639	113,72
[SK 2] Meningkatnya relevansi pembelajaran SMK dengan kebutuhan dunia kerja				
[IKK 2.1] Persentase SMK yang menerapkan pembelajaran link and match dengan dunia kerja	%	48,00	50,68	105,57
SMK yang Dikembangkan Menjadi Pusat Keunggulan	Lembaga	1.340	1.478	110,30
SMK yang Melaksanakan Program UKS	Lembaga	72	72	100,00
SMK yang Mengembangkan Proyek Kreatif dan Kewirausahaan	Lembaga	240	240	100,00
SMK yang Dikembangkan Berbasis Industri 4.0	Lembaga	63	63	100,00
SMK yang Mendapatkan Pendampingan Peningkatan Mutu	Lembaga	72	72	100,00
SMK yang Mengembangkan Pengajaran Berbasis Pabrik (Teaching Factory)	Lembaga	315	315	100,00
[SK 3] Meningkatnya tata kelola Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan				
[IKK 3.1] Predikat SAKIP Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan	Predikat	BB	A	100,63
Layanan Umum	Layanan	1	1	100,00
[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan	Nilai	95,00	97,63	102,77
Layanan BMN	Dokumen	1	1	100,00
Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	100,00
Layanan Sarana Internal	Unit	21	21	100,00

Sumber: MoLK per tanggal 27 Januari 2025

Dilihat dari capaian yang ada, semua target sudah tercapai dan bahkan sebagian melewati dari target yang ditentukan.

2. Efisiensi dan Optimalisasi Anggaran

Pada tahun 2024, Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan berhasil melakukan efisiensi sebesar Rp20.042.923.020,- atau 1,20% dari anggaran dengan rata-rata capaian IKK sebesar 108,20% dari 4 IKK. Hasil efisiensi tersebut diperoleh dari melalui optimalisasi anggaran yang akan diperuntukkan program bantuan SMK Pusat Keunggulan dan Sertifikasi Bahasa Asing (non bahasa Inggris). Anggaran hasil efisiensi digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lebih prioritas seperti:

- Pelaksanaan program SMK Pusat Keunggulan memperoleh capaian yang lebih banyak dibandingkan target sasaran yang ditetapkan, hal ini diperoleh melalui pengalihan anggaran yang sebelumnya diperuntukkan bagi SMK Pusat Keunggulan melalui skema pemadanan dukungan kepada penambahan sasaran untuk jumlah SMK Pusat Keunggulan yang baru.

- b. Anggaran untuk program Sertifikasi Bahasa Asing (non bahasa Inggris) yang sebelumnya tidak dapat terlaksana dikarenakan mitra lembaga sertifikasi belum bisa memenuhi kuota disebabkan antrian peserta lain yang akan mengikuti sertifikasi dialihkan kepada program Sertifikasi Kompetensi Keahlian.

D. Kinerja Lain-lain

1. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan pada Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan adalah dalam rangka untuk menuju Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI WBK) yang merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Reformasi birokrasi berfokus pada perbaikan layanan publik melalui digitalisasi dan penyederhanaan proses pelayanan. Adapun langkah-langkah kerja yang telah dilakukan pada Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat Kementerian adalah sebagai berikut:

- a. Pencanangan komitmen bersama pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI WBK) tahun 2024 yang melibatkan seluruh pimpinan dan pegawai yang ada di Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan
- b. Penyusunan program kerja tim Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI WBK) yang mencakup 6 area yaitu: a. Area Manajemen Perubahan; b. Area Penataan Tatalaksana; c. Area Penataan Sistem Manajemen SDM; d. Area Penguatan Akuntabilitas; e. Area Penguatan Pengawasan; dan f. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- c. Pengisian LKE Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI WBK) secara mandiri telah dilakukan sebagai salah satu proses untuk menuju ZI WBK.

Melalui upaya ini, diharapkan agar birokrasi lebih efisien, berintegritas, dan mampu mendukung program-program pendidikan yang berdampak luas bagi masyarakat.

2. Informasi Capaian Kinerja Lainnya yang mendukung

Pada tahun 2024, capaian kinerja lainnya yang mendukung ketercapaian indikator kinerja yang menjadi isu dan agenda nasional yaitu mendorong penurunan angka kemiskinan secara nasional. Pemerintah telah membuat berbagai kebijakan, seperti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang melibatkan 22 kementerian, 6 lembaga, dan pemda untuk bersinergi membuat berbagai program pengentasan kemiskinan ekstrem melalui strategi dalam menurunkan beban pengeluaran mendorong peningkatan pendapatan, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan sebagai salah satu unit kerja dari Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi memberikan kontribusi melalui program yang

merupakan intervensi sebagai aksi dari upaya percepatan pengentasan kemiskinan. Melalui program Projek Kreatif dan Kewirausahaan di SMK, siswa diajarkan untuk bagaimana menumbuhkan jiwa kewirausahaan sehingga nantinya ketika lulus dapat mendorong terbentuknya entrepreneur baru yang akhirnya terbentuknya lowongan baru pada pasar kerja. Dalam pelaksanaan program ini, siswa juga diberikan stimulus berupa dana modal untuk menjalankan proyek usaha yang telah disusun secara tim dengan diberikan pembimbingan dari pihak guru.

Pelaksanaan program Projek Kreatif dan Kewirausahaan dari tahun 2020 s.d. tahun 2024 telah menysasar sebanyak 1.040 SMK dengan target tiap sekolah mampu membentuk 10 tim yang menjalan proyek kewirausahaan. Namun, dalam pelaksanaannya terkendala yang modal yang dapat diberikan untuk pengembangan usaha yang sudah dijalankan oleh siswa SMK. Kedepannya perlu adanya kerjasama dengan lembaga peminjaman modal bergulir yang lunak sebagai program tindak lanjut atas program ini, dimana keterlibatan instansi lainnya diperlukan sehingga kebijakan untuk pengentasan angka kemiskinan dapat tercapai dengan baik.

3. Program *Crosscutting/Collaborative*

Pada tahun 2024, Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) melaksanakan program Pendampingan SMK Pusat Keunggulan. Program ini merupakan hasil kerja sama antara Direktorat SMK dan berbagai perguruan tinggi di Indonesia termasuk perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi negeri swasta, perguruan tinggi negeri BLUD, dan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

Sebagai bagian dari program ini, Perguruan Tinggi Pendamping (PTP) ditugaskan untuk mendampingi SMK yang menerima program SMK Pusat Keunggulan. Fokus utama pendampingan ini adalah pada aspek manajerial sekolah, khususnya dalam pengembangan sekolah.

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 94/D/O/2024

TENTANG
PENETAPAN PERGURUAN TINGGI PENDAMPING PELAKSANA
PROGRAM SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PUSAT KEUNGGULAN
TAHUN 2024

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 464/M/2021 tentang Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan, salah satu kegiatan dalam Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan adalah pelaksanaan pendampingan bagi kepala sekolah dan guru di Sekolah Menengah Kejuruan pelaksana program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan, serta pengawas sekolah;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melaksanakan seleksi dan menetapkan perguruan tinggi sebagai pelaksana pendampingan program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Penetapan Perguruan Tinggi Pendamping Pelaksana Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 103/D/O/2024

TENTANG
PENUGASAN PERGURUAN TINGGI PENDAMPING PELAKSANA PROGRAM
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PUSAT KEUNGGULAN
TAHUN 2024

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 464/M/2021 tentang Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan, dalam penyelenggaraan Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan salah satu kegiatan dalam Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan, perlu pendampingan bagi kepala sekolah dan guru di Sekolah Menengah Kejuruan pelaksana program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan, serta bagi pengawas sekolah;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dilaksanakan seleksi dan menetapkan perguruan tinggi sebagai pelaksana pendampingan program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Penugasan Perguruan Tinggi Pendamping Pelaksana Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan

Gambar 3.6. SK Penetapan dan Penugasan Perguruan Tinggi Pendamping

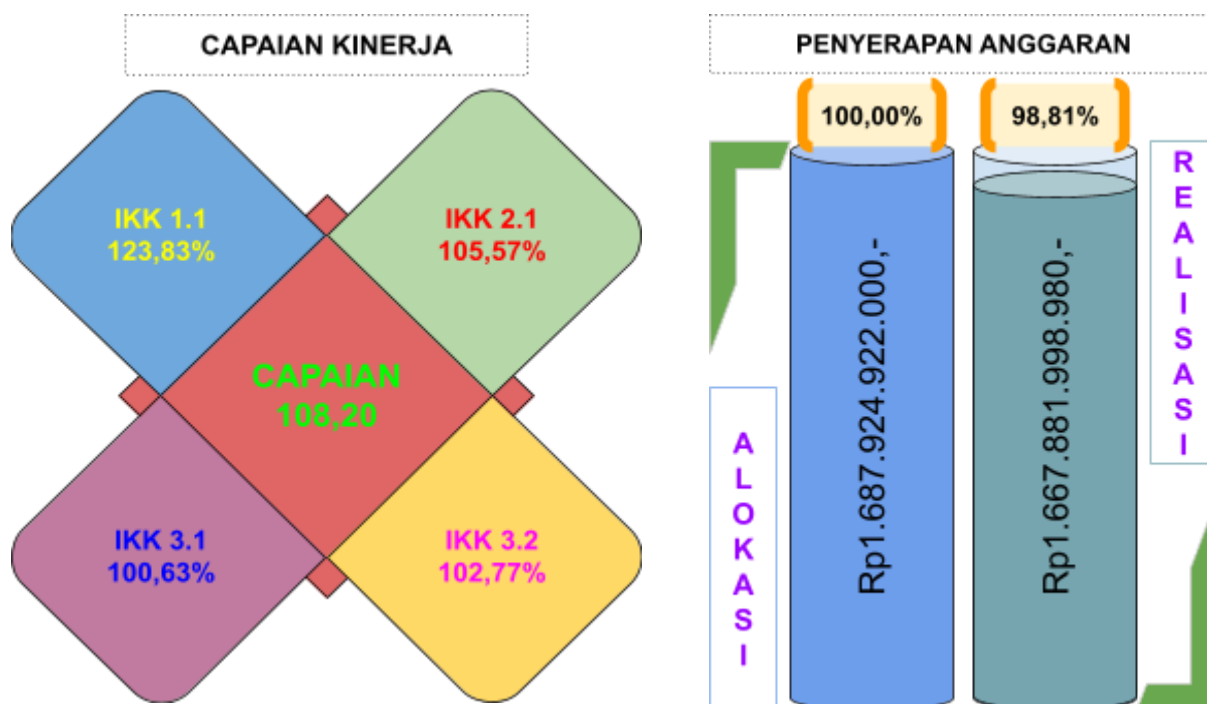
Direktorat SMK berperan sebagai kuasa pengguna anggaran pendampingan, tim seleksi PTP, serta fasilitasi antara SMK PK dan PTP. Sistem penggunaan anggarannya adalah uang diberikan kepada PTP disesuaikan dengan jumlah SMK PK yang didampingi oleh perguruan tinggi yang menjadi pendamping. Proses pendampingan juga dipantau dan dievaluasi oleh Direktorat SMK.

Perguruan tinggi yang menjadi pendamping bertugas sebagai pendamping SMK PK sesuai dengan pedoman yang sudah disusun oleh Direktorat SMK. Secara berkala, PTP melaporkan progres pelaksanaan pendampingan kepada fasilitator yang ada di Dit. SMK. Di akhir pelaksanaan pendampingan, PTP juga menyampaikan laporan seluruh pendampingan baik secara kegiatan atau pun penggunaan anggaran.

Diharapkan, dengan adanya pendampingan dari perguruan tinggi, Program SMK Pusat Keunggulan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuannya. Tujuan utamanya adalah peningkatan kualitas manajemen sekolah, sehingga setiap elemen di SMK dapat memenuhi perannya dengan baik. Akhirnya, SMK tersebut dapat menjadi pusat keunggulan seperti yang diharapkan.

BAB IV - Penutup

Selama tahun 2024, Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan.



Gambar 4.1. Capaian IKK dan Penyerapan Anggaran Dit. SMK Tahun 2024

Secara keseluruhan, kinerja Direktorat SMK ditanya berhasil karena rata-rata capaian 100,00% dari empat Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024. Hal ini juga menunjukkan adanya peningkatan dari tahun lalu yang di tahun lalu hanya tiga IKK yang berhasil tercapai dari empat yang ditetapkan. Capaian kinerja tersebut juga didukung oleh kinerja keuangan di tahun 2024 dengan penggunaan anggaran sebesar Rp1.687.924.922.000,- atau 98,81% dari total pagu sebesar Rp1.667.881.998.980,-.

Dari hasil evaluasi kinerja, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain:

1. Capaian pada indikator kinerja perlu ditindaklanjuti dengan melakukan kajian terhadap dampak yang memang dirasakan oleh satuan pendidikan SMK selaku sasaran penerima manfaat dalam pembinaan dan penerapan dari kebijakan yang dikeluarkan Direktorat SMK. Tentunya dengan mempertimbangkan faktor penguat eksternal yang juga memberikan kontribusi dalam ketercapaian dampak indikator tersebut.
2. Masih adanya pelaksanaan program yang belum optimal dikarenakan jadwal pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan tidak dapat berjalan sesuai agenda. Hal ini dikarenakan penyaluran dana anggaran tidak dapat dilakukan sesuai waktu yang direncanakan disebabkan masih berstatus blokir sehingga dalam implementasi kegiatannya tidak tepat waktu.

3. Keterbatasan data yang digunakan untuk mengukur ketercapaian indikator kinerja merupakan produk dari pihak eksternal unit kerja, dimana dalam proses pengolahan datanya melibatkan banyak jenjang pendidikan sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama. Sebagai antisipasi data awal dilakukan dengan membuat model proyeksi capaian beberapa tahun terakhir, dengan tetap menunggu data hasil publikasi oleh unit kerja yang berwenang.
4. SMK selaku penerima manfaat dari program-program bantuan yang diberikan oleh Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan perlu diberikan pendampingan yang lebih intensif dan efektif melalui koordinasi dengan pemda selaku yang berwenang atas satuan pendidikan menengah. Sinergi dan harmonisasi terhadap intervensi yang diberikan ke satuan pendidikan diperlukan guna mengantisipasi adanya tumpang tindih antara program bantuan pusat dan daerah serta identifikasi terhadap ketuntasan komponen standar nasional pendidikan.

Seiring dengan selesainya periode Rencana Strategi (Renstra) Tahun 2020-2024, dapat dikatakan bahwa Direktorat SMK telah melaksanakan program kegiatan berdasarkan target/sasaran kinerja yang ditetapkan dengan optimal. Selanjutnya, kita akan memasuki periode arah dan kebijakan baru, yaitu Renstra Tahun 2025-2029, dimana mengacu kepada Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Arah kebijakan baru tersebut tentunya akan memiliki program, target, sasaran kinerja dan anggaran yang baru dan mendukung peningkatan kualitas bidang pendidikan dan kebudayaan.

Berikut gambaran arah dan kebijakan bidang pendidikan menengah kejuruan untuk periode berikutnya:

1. SMK yang lebih Responsif : SMK melakukan transformasi dari pola pikir supply-driven ke demand-driven secara lebih luas, yang bukan saja memenuhi external demand (permintaan pemberi kerja) namun juga internal demand (kebutuhan peserta didik sesuai passion dan cita-citanya). Transformasi didukung oleh: a. Sistem informasi pasar kerja (*future jobs & gig economy*) yang terintegrasi dengan; SMK b. Mitra usaha dan industri bisa berkontribusi terhadap penyelenggaraan pendidikan, vokasi yang lebih responsif; c. Perubahan mindset pendidik dan kepala sekolah yang mendukung budaya vokasi; d. Tenaga profesional industri untuk menjadi instruktur; e. Pengembangan profesi pendidik secara berkelanjutan; dan f. Perbaikan sistem pendidikan guru SMK.
2. SMK yang Lebih “Green” : Beberapa hal yang dapat dikembangkan di antaranya: a. Mengembangkan green skills; b. Menguatkan STEM dan inovasi; c. Mempercepat digitalisasi; d. Menguatkan human skills; e. Menguatkan kecakapan lintas disiplin; f. Menguatkan kewirausahaan; dan g. Berorientasi pedesaan/berbasis wilayah.
3. SMK yang Lebih Inovatif dan Fleksibel : Implementasi kurikulum dalam pembelajaran yang fleksibel, berbasis proyek (*project-based learning*), dan TeFa untuk mencapai *deep learning* yang *mindful, meaningful, dan joyful*.

4. SMK yang Lebih Melintas Ruang dan Waktu : Prinsip dasar SMK adalah inklusif, non-diskriminatif, dan memastikan semua warga bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat.
5. SMK yang Lebih Humanis : Penguasaan *soft-skills* merefleksikan kualitas pribadi yang akan membantu peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi kemanusiaannya.
6. SMK yang Lebih Efektif dan Berkinerja Tinggi : SMK memiliki otonomi yang lebih besar untuk mengelola layanan pendidikannya, agar leluasa tumbuh dan belajar (*growth and learning organization*) sesuai dengan keunikannya.

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja Awal
2. Perjanjian Kinerja Revisi
3. Pengukuran Kinerja
4. Surat Pernyataan Laporan Kinerja Telah Direviu

1. Perjanjian Kinerja awal



**Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Direktur Sekolah Menengah Kejuruan
Dengan
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Wardani Sugiyanto
Jabatan : Direktur Sekolah Menengah Kejuruan
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Kiki Yulianti
Jabatan : Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 15 Februari 2024

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi,



Direktur Sekolah Menengah Kejuruan,



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI/E



Sasaran (S/SK)	Indikator (IKU/IKK)	Target Perjanjian Kinerja 2024
[1.0] Meningkatnya kompetensi lulusan SMK yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	[1.1] Persentase lulusan SMK yang berhasil memperoleh kompetensi yang sesuai dengan dunia kerja	40
[2.0] Meningkatnya relevansi pembelajaran SMK dengan kebutuhan dunia kerja	[2.1] Persentase SMK yang menerapkan pembelajaran link and match dengan dunia kerja	48
[3.0] Meningkatnya tata kelola Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan	[3.1] Predikat SAKIP Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan	BB
[3.0] Meningkatnya tata kelola Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan	[3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan	94

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1.	4261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi	Rp. 31.151.130.000,-
2.	4262	Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan	Rp. 1.656.828.991.000,-
Total Anggaran			Rp. 1.687.980.121.000,-

Jakarta, 15 Februari 2024

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi,



Direktur Sekolah Menengah Kejuruan,



Catatan :

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



2. Perjanjian Kinerja revisi



**Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Direktur Sekolah Menengah Kejuruan
Dengan
Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Yusro
Jabatan : Direktur Sekolah Menengah Kejuruan
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Tatang Muttaqin
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Plt. Direktur Jenderal Pendidikan
Vokasi
Tatang Muttaqin

Jakarta, 11 November 2024

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Sekolah Menengah
Kejuruan
Muhammad Yusro



Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[SK 1] Meningkatnya kompetensi lulusan SMK yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	[IKK 1.1] Persentase lulusan SMK yang berhasil memperoleh kompetensi yang sesuai dengan dunia kerja	%	40
[SK 2] Meningkatnya relevansi pembelajaran SMK dengan kebutuhan dunia kerja	[IKK 2.1] Persentase SMK yang menerapkan pembelajaran link and match dengan dunia kerja	%	48
[SK 3] Meningkatnya tata kelola Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan	[IKK 3.1] Predikat SAKIP Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan	Predikat	BB
	[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan	Nilai	94

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	4261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi	Rp 30.867.371.000
2	4262	Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan	Rp 1.656.828.991.000
Total Anggaran			Rp 1.687.696.362.000


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Plt. Direktur Jenderal Pendidikan
 Vokasi
 Tatang Muttaqin

Jakarta, 11 November 2024


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Direktur Sekolah Menengah
 Kejuruan
 Muhammad Yusro



Catatan :
 • UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Balai
 Sertifikasi
 Elektronik

3. Pengukuran Kinerja

a. Triwulan I



Laporan Kinerja Triwulan 1 Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan Tahun 2024

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan selama Triwulan 1 Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut :

A. Progress Capaian Kinerja Triwulan 1

No	Sasaran	Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
1.	[SK 1.0] Meningkatnya kompetensi lulusan SMK yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	[IKK 1.1] Persentase lulusan SMK yang berhasil memperoleh kompetensi yang sesuai dengan dunia kerja	40	%	0	0
2.	[SK 2.0] Meningkatnya relevansi pembelajaran SMK dengan kebutuhan dunia kerja	[IKK 2.1] Persentase SMK yang menerapkan pembelajaran link and match dengan dunia kerja	48	%	0	0
3.	[SK 3.0] Meningkatnya tata kelola Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan	[IKK 3.1] Predikat SAKIP Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan	BB	Predikat	-	-
4.	[SK 3.0] Meningkatnya tata kelola Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan	[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan	94	Nilai	0	0

B. Hasil Analisis Capaian Kinerja Triwulan 1



Catatan :

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI-E



1. [SK 1.0 Meningkatnya kompetensi lulusan SMK yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja] IKK 1.1 Persentase lulusan SMK yang berhasil memperoleh kompetensi yang sesuai dengan dunia kerja

Progress / Kegiatan :

Pelaksanaan koordinasi dengan industri terkait skema untuk uji sertifikasi kepada peserta didik SMK sehingga lulusan SMK yang telah Tersertifikasi Terhadap Kompetensi yang Relevan dengan Kebutuhan Dunia Kerja dapat diakui dan terserap lebih baik. Beberapa kegiatan lainnya yang mendukung agar kompetensi lulusan SMK sesuai dengan kebutuhan dunia kerja di antaranya:

- Persiapan koordinasi awal dalam rangka persiapan penyusunan pedoman magang/prakerin siswa yang merupakan bagian dari pembelajaran agar lulusan SMK memperoleh kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja
- Persiapan penyusunan dan diujikannya petunjuk teknis bantuan pemerintah terkait kegiatan untuk segera diterbitkan

Kendala / Permasalahan :

Sejauh ini belum ada kendala berarti yang dihadapi untuk SMK Pusat Keunggulan karena masih menunggu terbitnya juknis dan penentuan seleksi SMK PK tahun 2024. Sementara untuk sertifikasi kepada Siswa SMK terkendala pada belum banyaknya lembaga/institusi yang melakukan sertifikasi pada bidang-bidang tertentu sebagai bentuk peningkatan Kompetensi yang Relevan dengan Kebutuhan Dunia Kerja

Strategi / Tindak Lanjut :

- Melalui pelibatan dunia kerja terutama industri mitra untuk dapat memberikan training berikut sertifikasi kepada guru maupun siswa sehingga bentuk perolehan kompetensi sesuai dengan bidangnya
- Rencana yang sudah ada terus dipantau perkembangannya sehingga diharapkan kegiatan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

2. [SK 2.0 Meningkatnya relevansi pembelajaran SMK dengan kebutuhan dunia kerja] IKK 2.1 Persentase SMK yang menerapkan pembelajaran link and match dengan dunia kerja

Progress / Kegiatan :



Catatan :

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI-E



- SMK yang Mengembangkan Proyek Produk Kreatif dan Kewirausahaan:
 1. Telah dilakukannya koordinasi awal dalam rangka perencanaan pelaksanaan kegiatan
 2. Telah disusun dan diujikannya petunjuk teknis bantuan pemerintah terkait kegiatan untuk segera diterbitkan.
- SMK yang dikembangkan menjadi Pusat Keunggulan:
 1. Penerbitan juknis bantuan pemerintah SMK PK Tahun 2024
 2. Pelaksanaan seleksi SMK PK Tahun 2024 mulai dari pembukaan pengajuan SMK PK tahun 2024 oleh SMK hingga proses seleksi dan penentuan serta pengajuan untuk pembuatan SK penetapan.
- SMK yang Dikembangkan Berbasis Industri 4.0:
 1. Telah dilakukannya koordinasi awal dalam rangka perencanaan pelaksanaan kegiatan
 2. Telah disusun dan diujikannya petunjuk teknis bantuan pemerintah terkait kegiatan untuk segera diterbitkan.
- SMK yang melaksanakan UKS proses persiapan dan koordinasi dengan satker lainnya untuk pelaksanaan advokasi melalui Gerakan Sekolah Sehat (GSS)
- SMK yang Mengembangkan Pengajaran Berbasis Pabrik (Teaching Factory) sedang proses pengusulan serta seleksi kepada SMK yang telah mendaftar sebagai pelaksana program.

Kendala / Permasalahan :

- SMK yang Mengembangkan Proyek Produk Kreatif dan Kewirausahaan Sejauh ini belum ada kendala berarti yang dihadapi karena masih menunggu terbitnya juknis.
- SMK yang dikembangkan menjadi Pusat Keunggulan Sejauh ini belum ada kendala berarti karena masih menunggu terbitnya SK Penetapan SMK PK 2024 sehingga bisa meneruskan ke tahap selanjutnya.
- SMK yang Dikembangkan Berbasis Industri 4.0 Sejauh ini belum ada kendala berarti yang dihadapi karena masih menunggu proses seleksi setelah terbitnya juknis.

Strategi / Tindak Lanjut :

- SMK yang Mengembangkan Proyek Produk Kreatif dan Kewirausahaan Rencana yang sudah ada terus dipantau perkembangannya sehingga diharapkan kegiatan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
- SMK yang dikembangkan menjadi Pusat Keunggulan Rencana yang sudah ada terus dipantau perkembangannya sehingga diharapkan kegiatan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
- SMK yang Dikembangkan Berbasis Industri 4.0 Rencana yang sudah ada terus dipantau perkembangannya sehingga diharapkan kegiatan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan jadwal yang ditentukan.



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



3. [SK 3.0 Meningkatnya tata kelola Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan] IKK 3.1 Predikat SAKIP Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan

Progress / Kegiatan :

- Merencanakan pola kegiatan pemenuhan dan perbaikan dokumen SAKIP menyesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan dari pihak yang berkepentingan
- Reviu terhadap renstra, hal ini dikarenakan ada perubahan renstra Kemendikbudristek sehingga perlu dilakukan revisi renstra yang sudah ada menyesuaikan dengan target kinerja yang ada

Kendala / Permasalahan :

- Belum adanya SK Tim SAKIP Direktorat SMK sehingga menyulitkan untuk berkoordinasi secara terpusat terutama dalam hal pengumpulan data pemenuhan dokumen SAKIP
- Beberapa program dengan pola intervensi yang diberikan kepada sekolah perlu disesuaikan karena terkait perubahan tugas dan fungsi satker

Strategi / Tindak Lanjut :

- Melakukan koordinasi terkait pembentukan Tim SAKIP dengan pimpinan sehingga pelaksanaan program sesuai dengan target kinerja
- Melakukan reviu dan revisi ketika memang ada perubahan indikator serta target kinerja

4. [SK 3.0 Meningkatnya tata kelola Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan] IKK 3.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan

Progress / Kegiatan :

Melakukan review rutin terkait kesesuaian realisasi penyerapan anggaran dengan rencana penyerapan anggaran.



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



Kendala / Permasalahan :

Penyerapan masih belum sesuai rencana yang diharapkan karenanya adanya perubahan metode pelaksanaan serta perubahan perencanaan jadwal pelaksanaan kegiatan.

Strategi / Tindak Lanjut :

Melakukan penyesuaian kembali terkait rencana penyerapan dan rencana jadwal pelaksanaan kegiatan.

C. Capaian Fisik dan Anggaran Per-Rincian Output Triwulan 1

Uraian Rincian Output	Satuan	Volume	Capaian	Sisa Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
[690440.DL.4262.PDI.040] Siswa SMK yang Tersertifikasi Terhadap Kompetensi yang Relevan dengan Kebutuhan Dunia Kerja	Orang	125.000	0	125.000	73.651.649.000	503.746.628	73.147.902.372
[690440.DL.4262.PDI.041] Siswa SMK yang Mendapatkan Penguatan Persiapan Program Magang Luar Negeri	Orang	3.200	0	3.200	52.235.680.000	562.308.580	51.673.371.420
[690440.DL.4262.QDB.007] SMK yang Dikembangkan Menjadi Pusat Keunggulan	Lembaga	1.340	0	1.340	1.118.932.440.000	4.568.592.374	1.114.363.847.626
[690440.DL.4262.QDB.022] SMK yang Melaksanakan Program UKS	Lembaga	72	0	72	3.705.800.000	138.381.546	3.567.418.454
[690440.DL.4262.QDB.042] SMK yang Mengembangkan Proyek Kreatif dan Kewirausahaan	Lembaga	240	0	240	14.090.000.000	80.711.578	14.009.288.422
[690440.DL.4262.QDB.049] SMK yang Dikembangkan Berbasis Industri 40	Lembaga	63	0	63	72.212.500.000	593.421.801	71.619.078.199
[690440.DL.4262.QDB.050] SMK yang Mendapatkan Pendampingan Peningkatan Mutu	Lembaga	72	2	70	41.254.192.000	4.813.850.701	36.440.341.299
	Lembaga	315	0	315	280.746.730.000	192.654.000	280.554.076.000



Catatan :

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



[690440.DL.4262.QDB.051] SMK yang Mengembangkan Pengajaran Berbasis Pabrik Teaching Factory							
[690440.WA.4261.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	1	1	0	4.766.366.000	788.284.000	3.978.082.000
[690440.WA.4261.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	0	26.119.749.000	5.543.148.222	20.576.600.778
[690440.WA.4261.EBB.951] Layanan Sarana Internal	Unit	21	0	21	265.015.000	0	265.015.000
Total					1.687.980.121.000	17.785.099.430	1.670.195.021.570

D. Rekomendasi Pimpinan

Pelaksanaan pengukuran capaian kinerja Triwulan 1 merupakan langkah penting untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program/kegiatan yang merupakan pendukung ketercapaian indikator kinerja pada Direktorat SMK. Beberapa hal yang mungkin perlu menjadi poin untuk ditindaklanjuti diantaranya adalah sebagai berikut:

- Berkenaan dengan IKK Persentase Lulusan SMK yang berhasil memperoleh kompetensi yang sesuai dengan dunia kerja, beberapa program pendukung diantaranya sertifikasi perlu diberikan pemantauan secara intensif dan pemutakhiran datanya agar dikawal dengan baik sehingga data terkait siswa yang mendapatkan sertifikasi sesuai kebutuhan dunia kerja dapat dikumpulkan dengan valid. Disamping itu, program lainnya yang mendorong peningkatan kualitas dan mutu lulusan SMK juga perlu diberikan pendampingan sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Hasil capaian AN maupun data dari sistem tracer study dapat dimanfaatkan untuk memetakan SMK dengan kondisi capaian menengah ke bawah agar diberikan advokasi yang lebih intensif dengan melibatkan BBPPMPV.
- Dalam rangka mendorong ketercapaian IKK Persentase SMK yang menerapkan pembelajaran link and match dengan dunia kerja, para pengampu program dapat melakukan analisis ketercapaian hasil pembelajaran di satuan pendidikan SMK melalui hasil rapor. Cara ini sebagai bentuk advokasi dalam melalui evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran di sekolah, sehingga perangkat satuan pendidikan beserta komunitas pendidikan lainnya dapat membantu upaya peningkatan program-program sebagai bentuk pembenahan dari capaian rapor pendidikan sekolah.
- Untuk mendukung Predikat SAKIP Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan agar mencapai nilai BB, perlu adanya koordinasi oleh semua pegawai di lingkup Direktorat SMK. Subbag Tata Usaha perlu melakukan kontrol terhadap administrasi yang dilaksanakan masing-masing pokja agar sesuai dengan kaidah akuntabilitas dalam pengelolaan program dan anggaran keuangan negara.
- Meningkatkan Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan menjadi 94 membutuhkan upaya yang baik antar pokja yang mengelola keuangan, perlu dibangun sinergi.

Jakarta, 20 Mei 2024

Direktur Sekolah Menengah Kejuruan,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Wardani Sugiyanto
NIP 196403111989101001



Catatan :

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



b. Triwulan II



Laporan Kinerja Triwulan 2 Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan Tahun 2024

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan selama Triwulan 2 Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut :

A. Progress Capaian Kinerja Triwulan 2

No	Sasaran	Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
1.	[SK 1.0] Meningkatnya kompetensi lulusan SMK yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	[IKK 1.1] Persentase lulusan SMK yang berhasil memperoleh kompetensi yang sesuai dengan dunia kerja	40	%	0	0
2.	[SK 2.0] Meningkatnya relevansi pembelajaran SMK dengan kebutuhan dunia kerja	[IKK 2.1] Persentase SMK yang menerapkan pembelajaran link and match dengan dunia kerja	48	%	0	0
3.	[SK 3.0] Meningkatnya tata kelola Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan	[IKK 3.1] Predikat SAKIP Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan	BB	Predikat	-	-
4.	[SK 3.0] Meningkatnya tata kelola Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan	[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan	94	Nilai	0	0

B. Hasil Analisis Capaian Kinerja Triwulan 2



Catatan :

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI/E



1. [SK 1.0 Meningkatnya kompetensi lulusan SMK yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja] IKK 1.1 Persentase lulusan SMK yang berhasil memperoleh kompetensi yang sesuai dengan dunia kerja

Progress / Kegiatan :

Kompetensi yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan Dunia Kerja merupakan tujuan pelaksanaan pendidikan di SMK, sehingga diharapkan lulusannya dapat diakui dan terserap di pasar kerja dengan lebih baik. Program yang dilaksanakan untuk mendukung dan diharapkan mempunyai kontribusi agar kompetensi lulusan SMK sesuai dengan kebutuhan dunia kerja di antaranya:

1. Bantuan Sertifikasi Kompetensi dan bahasa asing Siswa SMK

Pelaksanaan program sertifikasi kepada peserta didik SMK merupakan salah satu upaya agar lulusan SMK memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan DUDI, sehingga mampu memperoleh pendapatan sesuai dengan standar pada saat diterima di dunia kerja. Progres pelaksanaan program sertifikasi telah sampai pada penetapan SMK penerima dalam bentuk SK dengan sasaran peserta sebanyak 85.000 peserta didik SMK yang tersebar di 178 satuan pendidikan SMK, dimana sampai dengan bulan Juni penyaluran sudah dilakukan sebesar 70% dari total peserta.

1. Siswa yang mendapatkan Penguatan Persiapan Magang Luar Negeri

Upaya mempersiapkan lulusan SMK agar mampu bersaing dengan pekerja migran di tingkat global maka perlu dilakukan intervensi yang diharapkan memberikan kontribusi diantaranya melalui program penguatan persiapan magang luar negeri. Sampai dengan triwulan 2 telah ditetapkan dan disalurkan kepada penerima sebanyak 3.639 peserta didik di SMK atau 113% dari target yang ditetapkan.

Kendala / Permasalahan :

Target sasaran DIPA Awal pada Rincian Output Siswa SMK yang Tersertifikasi Terhadap Kompetensi yang Relevan dengan Kebutuhan Dunia Kerja sebanyak 125.000 Siswa, dengan rincian 85.000 siswa akan diberikan program sertifikasi kompetensi, 30.000 siswa untuk sertifikasi bahasa Inggris dan 10.000 untuk bahasa asing selain bahasa Inggris. Namun, dalam pelaksanaannya untuk bahasa asing lainnya non bahasa Inggris tidak memenuhi kuota dikarenakan sulitnya SMK yang siap dengan lembaga sertifikasi yang dipersyaratkan sehingga hanya tercapai 5.933 siswa.

Strategi / Tindak Lanjut :

- Melakukan revisi anggaran terhadap target yang tidak tercapai dari pelaksanaan sertifikasi bahasa asing lainnya non bahasa Inggris, untuk kemudian dialihkan pada program sertifikasi kompetensi siswa SMK. Melalui optimalisasi anggaran bahasa asing lainnya non bahasa Inggris



Catatan :

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI/E



dapat menambah sasaran sertifikasi kompetensi siswa SMK dari semula 85.000 Siswa menjadi bertambah menjadi sebanyak 101.198 siswa, sehingga perlu dilakukan dibuka pelaksanaan seleksi kembali. Dengan adanya revisi optimalisasi ini maka proyeksi capaian pada RO tersebut sebanyak 137.131 siswa (109,70%).

- Capaian output yang melebihi target sasaran perlu dilakukan pemantauan yang lebih intensif, hal ini untuk mengetahui kualitas dan mutu kegiatan sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan program dalam mendukung indikator kinerja direktorat.

2. [SK 2.0 Meningkatnya relevansi pembelajaran SMK dengan kebutuhan dunia kerja] IKK 2.1 Persentase SMK yang menerapkan pembelajaran link and match dengan dunia kerja

Progress / Kegiatan :

Capaian IKK 2.1 berupa persentase SMK yang menerapkan pembelajaran link and match dengan dunia kerja masih belum bisa diukur sampai dengan triwulan II. Pengukuran capaiannya baru dapat dilakukan pada triwulan IV, dengan sumber data yang digunakan berasal dari Survei Lingkaran Belajar (Sulinjar) yang dilaksanakan oleh Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) yang dikomparasikan dengan data hasil Tracer Study yang dilakukan Direktorat Mitras DUDI. Data yang digunakan merupakan bagian dari hasil Asesmen Nasional (AN) pada bulan Agustus yang rutin dirilis pada bulan Desember dengan formula perhitungan total satuan SMK yang telah melakukan penyelarasan kurikulum dengan DUDI dibagi total SMK keseluruhan dikalikan 100%.

Dalam mendukung pencapaian serta meningkatnya persentase SMK yang menerapkan pembelajaran link and match dengan dunia kerja, beberapa program yang dilaksanakan oleh Direktorat SMK diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan, diantaranya:

1. SMK yang Dikembangkan menjadi Pusat Keunggulan

Program Pengembangan SMK Pusat Keunggulan saat ini ada yang mengusulkan melalui skema pemadanan dengan mitra dunia industri, dengan adanya keterlibatan industri dalam pengembangan SMK diharapkan mampu menghasilkan lulusan sesuai kebutuhan DUDI. SMK Pusat Keunggulan melalui skema pemadanan sudah ditetapkan dalam bentuk SK sebanyak 510 SMK. Sementara untuk SMK Pusat Keunggulan Reguler sudah ditetapkan dalam bentuk SK sebanyak 931 SMK, dengan rincian yang baru sebanyak 195 SMK dan yang lanjutan 736 SMK. Penyaluran sudah dilakukan sebanyak 60% dari total SMK penerima.

1. SMK yang Dikembangkan Berbasis Industri 4.0

Program pengembangan SMK dalam mendukung industri 4.0 diharapkan mampu menciptakan lulusan dengan kompetensi keahlian sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi terkini. Pada program SMK yang Dikembangkan Berbasis Industri 4.0 sudah dilakukan penetapan dalam bentuk SK sebanyak 63 SMK. Penyaluran termin I telah dilakukan kepada semua SMK penerima.

1. Penyaluran Bantuan SMK yang Mengembangkan Proyek Kreatif dan Kewirausahaan

Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE



SMK mendukung produk kreatif dan kewirausahaan. Program ini dilaksanakan untuk menciptakan lulusan SMK dengan kemampuan entrepreneurship. Lulusan ditargetkan agar memiliki peluang untuk mendapatkan penghasilan sesuai dengan standar upah minimal yang ditentukan. Penyaluran bantuan SMK yang Mengembangkan Proyek Kreatif dan Kewirausahaan telah dilakukan penetapan dalam bentuk SK sebanyak 120 SMK. Penyaluran telah dilakukan ke sebanyak 116 sekolah.

1. SMK yang Mengembangkan Pengajaran Berbasis Pabrik (Teaching Factory)

- Upaya untuk mendorong siswa agar merasakan pengalaman pembelajaran sesuai dunia kerja salah satunya melalui model pembelajaran teaching factory. Pada tahun 2024 program SMK yang melaksanakan teaching factory diberikan sebagai bentuk untuk mendorong terlaksananya model pembelajaran ini di satuan pendidikan, dimana terdapat 2 skema yaitu reguler dan pengimbasan.
- SMK yang mengembangkan Pengajaran Berbasis Pabrik (Teaching Factory) Skema Reguler telah ditetapkan dalam bentuk SK sebanyak 25 SMK pada skema reguler. Penyaluran telah dilakukan ke semua SMK penerima pada skema reguler.
- Untuk SMK yang mengembangkan Pengajaran Berbasis Pabrik (Teaching Factory) Skema Pengimbasan masih dalam proses seleksi.
- Sementara untuk Pembelajaran SMK Berbasis Industri masih dalam proses seleksi.

Kendala / Permasalahan :

1. Program SMK yang melaksanakan teaching factory dilaksanakan melalui skema pengimbasan dengan pelibatan dunia usaha diharapkan mampu meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah, namun masih sedikit satuan pendidikan yang dapat melengkapi persyaratan sehingga masih sedikit SMK yang memenuhi kriteria untuk di-SK-kan untuk mendapatkan program bantuan.
2. Adanya perubahan target komposisi antara SMK PK Reguler dan Skema Pemadanan Dukungan mengakibatkan masih belum tercapai untuk target total sebanyak 1.450 SMK yang akan diberikan program bantuan Pengembangan SMK menjadi Pusat Keunggulan.
3. Adanya keterlambatan 4 satuan pendidikan SMK pada saat penyaluran program bantuan Proyek Kreatif dan Kewirausahaan dikarenakan keterlambatan dalam menyampaikan dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk proses penyaluran.

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Melakukan penguatan sosialisasi dengan melibatkan berbagai pihak (DUDI, praktisi, akademisi) untuk memberikan kontribusi pelaksanaan tefa pengimbasan, sehingga program dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan seleksi lanjutan dengan melakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap SMK yang pernah mendaftar untuk mengajukan program pengembangan SMK Pusat Keunggulan sehingga dapat mempercepat terpenuhinya kuota dari penerima program yang belum mencapai target.
3. Dilakukan penagihan secara intensif kepada satuan pendidikan SMK agar segera melengkapi dan mempercepat pengiriman dokumen pendukung yang diperlukan untuk kemudian dilakukan penyaluran susulan untuk 4 SMK yang mengalami keterlambatan.



- Catatan :
1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
 2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE



3. [SK 3.0 Meningkatnya tata kelola Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan] IKK 3.1 Predikat SAKIP Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan

Progress / Kegiatan :

- Merencanakan pola kegiatan pemenuhan serta perbaikan dokumen SAKIP untuk dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan dari pihak yang berkepentingan dalam rangka peningkatan nilai dalam bentuk pemantauan rutin terhadap ketercapaian target indikator kinerja Direktorat SMK;
- Persiapan evaluasi terhadap capaian akhir renstra 2019-2024, hal ini dikarenakan ada masa pembangunan nasional dan renstra Kemendikbudristek 2025-2029 sehingga perlu dilakukan evaluasi renstra yang sudah dilaksanakan dengan target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2019-2024.

Kendala / Permasalahan :

- Belum adanya SK Tim SAKIP Direktorat SMK sehingga menyulitkan untuk berkoordinasi secara terpusat terutama dalam hal pengumpulan data pemenuhan dokumen SAKIP;
- Beberapa program dengan pola intervensi yang diberikan kepada sekolah perlu disesuaikan karena terkait perubahan tugas dan fungsi satker.

Strategi / Tindak Lanjut :

- Melakukan koordinasi terkait pembentukan Tim SAKIP dengan pimpinan sehingga pelaksanaan program sesuai dengan target kinerja;
- Melakukan reviu dan revisi ketika memang ada perubahan indikator serta target kinerja.

4. [SK 3.0 Meningkatnya tata kelola Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan] IKK 3.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



Progress / Kegiatan :

- Melakukan review rutin bulanan dan triwulanan terkait kesesuaian realisasi penyerapan anggaran dengan rencana penyerapan anggaran.
- Penyusunan Standar Biaya Keluaran (SBK) sebagai bentuk peningkatan penilaian NKA Direktorat SMK sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang berlaku.

Kendala / Permasalahan :

Penyerapan masih belum sesuai rencana (RPD) yang telah ditetapkan dalam system aplikasi Sakti Kemenkeu dikarenakan adanya perubahan metode pelaksanaan serta perubahan perencanaan jadwal pelaksanaan kegiatan.

Strategi / Tindak Lanjut :

Pelaksana/PIC kegiatan akan berkoordinasi dengan tim perencanaan program agar melakukan penyesuaian kembali terkait rencana penyerapan dan rencana jadwal pelaksanaan kegiatan. Disamping itu, pelaksanaan program perlu diberikan pemantauan rutin agar sesuai dengan rencana yang sudah diisikan dalam system Sakti Kemenkeu.

C. Capaian Fisik dan Anggaran Per-Rincian Output Triwulan 2

Uraian Rincian Output	Satuan	Volume	Capaian	Sisa Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
[690440.DL.4262.PDI.040] Siswa SMK yang Tsertifikasi Terhadap Kompetensi yang Relevan dengan Kebutuhan Dunia Kerja	Orang	125.000	0	125.000	73.651.649.000	19.582.247.006	54.069.401.994
[690440.DL.4262.PDI.041] Siswa SMK yang Mendapatkan Penguatan Persiapan Program Magang Luar Negeri	Orang	3.200	0	3.200	52.235.680.000	34.907.513.575	17.328.166.425
[690440.DL.4262.QDB.007] SMK yang Dikembangkan Menjadi Pusat Keunggulan	Lembaga	1.340	0	1.340	1.118.932.440.000	548.498.365.327	570.434.074.673
	Lembaga	72	0	72	3.705.800.000	432.796.634	3.273.003.366



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



[690440.DL.4262.QDB.022] SMK yang Melaksanakan Program UKS							
[690440.DL.4262.QDB.042] SMK yang Mengembangkan Proyek Kreatif dan Kewirausahaan	Lembaga	240	0	240	14.090.000.000	578.233.578	13.511.766.422
[690440.DL.4262.QDB.049] SMK yang Dikembangkan Berbasis Industri 40	Lembaga	63	0	63	72.212.500.000	41.229.199.694	30.983.300.306
[690440.DL.4262.QDB.050] SMK yang Mendapatkan Pendampingan Peningkatan Mutu	Lembaga	72	0	72	41.254.192.000	13.533.955.279	27.720.236.721
[690440.DL.4262.QDB.051] SMK yang Mengembangkan Pengajaran Berbasis Pabrik Teaching Factory	Lembaga	315	0	315	280.746.730.000	5.440.915.580	275.305.814.420
[690440.WA.4261.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	1	0	1	4.766.366.000	1.378.379.000	3.387.987.000
[690440.WA.4261.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	1	0	1	26.119.749.000	11.476.432.808	14.643.316.192
[690440.WA.4261.EBB.951] Layanan Sarana Internal	Unit	21	0	21	265.015.000	155.000.000	110.015.000
Total					1.687.980.121.000	677.213.038.481	1.010.767.082.519

D. Rekomendasi Pimpinan

Pelaksanaan pengukuran capaian kinerja Triwulan 2 merupakan bagian dari proses penting dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program/kegiatan yang merupakan pendukung ketercapaian indikator kinerja pada Direktorat SMK. Beberapa hal yang mungkin perlu menjadi poin untuk dapat ditindaklanjuti diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Berkenaan dengan IKK Persentase Lulusan SMK yang berhasil memperoleh kompetensi yang sesuai dengan dunia kerja, beberapa program pendukung diantaranya sertifikasi perlu diberikan pemantauan secara intensif dan pemutakhiran datanya agar dikawal dengan baik sehingga data terkait siswa yang mendapatkan sertifikasi sesuai kebutuhan dunia kerja dapat dikumpulkan dengan valid. Disamping itu, program lainnya yang mendorong peningkatan kualitas dan mutu lulusan SMK juga perlu diberikan pendampingan sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Hasil capaian AN maupun data dari sistem tracer study dapat dimanfaatkan untuk memetakan SMK dengan kondisi capaian menengah ke bawah agar diberikan advokasi yang lebih intensif dengan melibatkan BBPPMPV.
2. Dalam rangka mendorong ketercapaian IKK Persentase SMK yang menerapkan pembelajaran link and match dengan dunia kerja, para pengampu program dapat melakukan analisis ketercapaian hasil pembelajaran di satuan pendidikan SMK melalui hasil rapor pendidikan. Cara ini sebagai bentuk advokasi dalam melalui evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran di sekolah, sehingga perangkat satuan pendidikan beserta komunitas pendidikan lainnya dapat membantu upaya peningkatan program-program sebagai bentuk pembenahan dari capaian rapor pendidikan sekolah.



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE



3. Predikat SAKIP Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan perlu diupayakan agar nilainya dapat mencapai BB atau bahkan A, sehingga semua pemangku/PIC program di lingkup Direktorat SMK perlu melakukan koordinasi secara rutin sebagai bentuk control terhadap capaian nilai sakip. Subbag Tata Usaha diharapkan meningkatkan perannya dalam melakukan kontrol terhadap administrasi yang dilaksanakan masing-masing pokja agar sesuai dengan kaidah akuntabilitas dalam pengelolaan program dan anggaran keuangan negara.
4. Meningkatkan Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan agar mencapai nilai 94 memang membutuhkan upaya yang lebih besar dari setiap pemangku kegiatan terlebih lagi yang mengelola keuangan. Perlu dibangun sinergi diantara pemangku/PIC kegiatan agar bisa lebih fleksibel dalam melaksanakan kegiatan.

Jakarta, 07 Agustus 2024

Direktur Sekolah Menengah Kejuruan,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Wardani Sugiyanto
NIP 196403111989101001



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE



c. Triwulan III



**Laporan Kinerja Triwulan 3
Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan
Tahun 2024**

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan selama triwulan 3 tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
[SK 1] Meningkatnya kompetensi lulusan SMK yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja				
[IKK 1.1] Persentase lulusan SMK yang berhasil memperoleh kompetensi yang sesuai dengan dunia kerja	40	%	0	0
[SK 2] Meningkatnya relevansi pembelajaran SMK dengan kebutuhan dunia kerja				
[IKK 2.1] Persentase SMK yang menerapkan pembelajaran link and match dengan dunia kerja	48	%	0	0
[SK 3] Meningkatnya tata kelola Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan				
[IKK 3.1] Predikat SAKIP Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan	BB	Predikat	-	-
[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan	94	Nilai	0	0

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Meningkatnya kompetensi lulusan SMK yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja
[IKK 1.1] Persentase lulusan SMK yang berhasil memperoleh kompetensi yang sesuai dengan dunia kerja

Progress/Kegiatan

Kompetensi yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan Dunia Kerja merupakan tujuan pelaksanaan pendidikan di SMK, sehingga diharapkan lulusannya dapat diakui dan terserap di pasar kerja dengan lebih baik. Program yang dilaksanakan untuk mendukung dan diharapkan mempunyai kontribusi agar kompetensi lulusan SMK sesuai dengan kebutuhan dunia kerja di antaranya:

1. Bantuan Sertifikasi Kompetensi dan bahasa asing Siswa SMK

Pelaksanaan program sertifikasi kepada peserta didik SMK merupakan salah satu upaya agar lulusan SMK memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan DUDI, sehingga mampu memperoleh pendapatan sesuai dengan standar pada saat diterima di dunia kerja. Progres



Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Balai Sertifikasi Elektronik

pelaksanaan program sertifikasi telah sampai pada penetapan SMK penerima dalam bentuk SK dengan sasaran peserta sebanyak 101.198 peserta didik SMK yang tersebar di 448 satuan pendidikan SMK, dimana sampai dengan bulan September penyaluran sudah dilakukan sebesar 90% dari total peserta.

2. Siswa yang mendapatkan Penguatan Persiapan Magang Luar Negeri

Upaya mempersiapkan lulusan SMK agar mampu bersaing dengan pekerja migran di tingkat global maka perlu dilakukan intervensi yang diharapkan memberikan kontribusi diantaranya melalui program penguatan persiapan magang luar negeri. Sampai dengan triwulan 2 telah ditetapkan dan disalurkan kepada penerima sebanyak 3.639 peserta didik di SMK atau 113% dari target yang ditetapkan.

Kendala/Permasalahan

Target sasaran DIPA Awal pada Rincian Output Siswa SMK yang Tersertifikasi Terhadap Kompetensi yang Relevan dengan Kebutuhan Dunia Kerja sebanyak 125.000 Siswa, dengan rincian 85.000 siswa akan diberikan program sertifikasi kompetensi, 30.000 siswa untuk sertifikasi bahasa Inggris dan 10.000 untuk bahasa asing selain bahasa Inggris. Namun, dalam pelaksanaannya untuk bahasa asing lainnya non bahasa Inggris tidak memenuhi kuota dikarenakan sulitnya SMK yang siap dengan lembaga sertifikasi yang dipersyaratkan sehingga hanya tercapai 5.933 siswa.

Strategi/Tindak Lanjut

- Melakukan revisi anggaran terhadap target yang tidak tercapai dari pelaksanaan sertifikasi bahasa asing lainnya non bahasa Inggris, untuk kemudian dialihkan pada program sertifikasi kompetensi siswa SMK. Melalui optimalisasi anggaran bahasa asing lainnya non bahasa Inggris dapat menambah sasaran sertifikasi kompetensi siswa SMK dari semula 85.000 Siswa menjadi bertambah menjadi sebanyak 101.198 siswa, sehingga perlu dilakukan dibuka pelaksanaan seleksi kembali. Dengan adanya revisi optimalisasi ini maka proyeksi capaian pada RO tersebut sebanyak 137.131 siswa (109,70%).
- Capaian output yang melebihi target sasaran perlu dilakukan pemantauan yang lebih intensif, hal ini untuk mengetahui kualitas dan mutu kegiatan sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan program dalam mendukung indikator kinerja direktorat.

[SK 2] Meningkatnya relevansi pembelajaran SMK dengan kebutuhan dunia kerja

[IKK 2.1] Persentase SMK yang menerapkan pembelajaran link and match dengan dunia kerja

Progress/Kegiatan

Capaian IKK 2.1 terkait persentase SMK yang menerapkan pembelajaran link and match dengan dunia kerja masih belum bisa diukur sampai dengan triwulan III. Pengukuran capaiannya baru dapat dilakukan pada triwulan IV, dengan sumber data yang digunakan berasal dari Survei Lingkungan Belajar (Sulinjar) yang dilaksanakan oleh Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) yang dikomparasikan dengan data hasil Tracer Study yang dilakukan Direktorat Mitras DUDI. Data yang digunakan merupakan bagian dari hasil Asesmen Nasional (AN) pada bulan Agustus yang rutin dirilis pada bulan Desember dengan formula perhitungan total satuan SMK yang telah melakukan penyesuaian kurikulum dengan DUDI dibagi total SMK keseluruhan dikalikan 100%.

Dalam mendukung pencapaian serta meningkatnya persentase SMK yang menerapkan pembelajaran link and match dengan dunia kerja, beberapa program yang dilaksanakan oleh Direktorat SMK diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan, diantaranya:



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Balai
Sertifikasi
Elektronik

1. SMK yang Dikembangkan menjadi Pusat Keunggulan

Program Pengembangan SMK Pusat Keunggulan saat ini ada yang mengusulkan melalui skema pemadanan dengan mitra dunia industri, dengan adanya keterlibatan industri dalam pengembangan SMK diharapkan mampu menghasilkan lulusan sesuai kebutuhan DUDI. SMK Pusat Keunggulan melalui skema pemadanan sudah ditetapkan dalam bentuk SK sebanyak 510 SMK. Sementara untuk SMK Pusat Keunggulan Reguler sudah ditetapkan dalam bentuk SK sebanyak 931 SMK, dengan rincian yang baru sebanyak 195 SMK dan yang lanjutan 736 SMK dengan penyaluran untuk termin 2 sedang proses penagihan laporan capaian 50% dari kegiatan di sekolah.

2. SMK yang Dikembangkan Berbasis Industri 4.0

Program pengembangan SMK dalam mendukung industri 4.0 diharapkan mampu menciptakan lulusan dengan kompetensi keahlian sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi terkini. Pada program SMK yang Dikembangkan Berbasis Industri 4.0 sudah dilakukan penetapan dalam bentuk SK sebanyak 63 SMK. Penyaluran termin 2 sedang proses melalui penagihan laporan capaian 50% dari kegiatan yang dilaksanakan oleh SMK penerima.

3. Penyaluran Bantuan SMK yang Mengembangkan Proyek Kreatif dan Kewirausahaan

SMK mendukung produk kreatif dan kewirausahaan. Program ini dilaksanakan untuk menciptakan lulusan SMK dengan kemampuan entrepreneurship. Lulusan ditargetkan agar memiliki peluang untuk mendapatkan penghasilan sesuai dengan standar upah minimal yang ditentukan. Penyaluran bantuan SMK yang Mengembangkan Proyek Kreatif dan Kewirausahaan telah dilakukan penetapan dalam bentuk SK sebanyak 240 SMK dengan penyaluran telah dilakukan ke sebanyak 239 sekolah, dimana 1 SMK mengalami keterlambatan sebelumnya dikarenakan belum lengkapnya dokumen pendukung yang dipersyaratkan.

4. SMK yang Mengembangkan Pengajaran Berbasis Pabrik (Teaching Factory)

Upaya untuk mendorong siswa agar merasakan pengalaman pembelajaran sesuai dunia kerja salah satunya melalui model pembelajaran teaching factory. Pada tahun 2024 program SMK yang melaksanakan teaching factory diberikan sebagai bentuk untuk mendorong terlaksananya model pembelajaran ini di satuan pendidikan, dimana terdapat 2 skema yaitu reguler dan pengimbasan. SMK yang mengembangkan Pengajaran Berbasis Pabrik (Teaching Factory) Skema Reguler telah ditetapkan dalam bentuk SK sebanyak 25 SMK pada skema reguler dengan penyaluran telah dilakukan ke semua SMK penerima pada skema reguler. Untuk SMK yang mengembangkan Pengajaran Berbasis Pabrik (Teaching Factory) Skema Pengimbasan telah ditetapkan sebanyak 290 SMK dan telah disalurkan untuk termin 1. Sementara untuk penyaluran pada termin 2 sedang dilakukan penagihan pelaporan 50% dari pelaksanaan kegiatan oleh sekolah untuk proses penyaluran termin 2.

Kendala/Permasalahan

1. Program SMK yang melaksanakan teaching factory dilaksanakan melalui skema pengimbasan dengan pelibatan dunia usaha diharapkan mampu meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah, namun masih sedikit satuan pendidikan yang dapat melengkapi persyaratan sehingga masih sedikit SMK yang memenuhi kriteria untuk di-SK-kan untuk mendapatkan program bantuan.
2. Adanya perubahan target komposisi antara SMK PK Reguler dan Skema Pemadanan Dukungan mengakibatkan masih belum tercapai untuk target total sebanyak 1.450 SMK yang akan diberikan program bantuan Pengembangan SMK menjadi Pusat Keunggulan.



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Balai
Sertifikasi
Elektronik

3. Adanya keterlambatan 4 satuan pendidikan SMK pada saat penyaluran program bantuan Proyek Kreatif dan Kewirausahaan dikarenakan keterlambatan dalam menyampaikan dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk proses penyaluran.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Melakukan penguatan sosialisasi dengan melibatkan berbagai pihak (DUDI, praktisi, akademisi) untuk memberikan kontribusi pelaksanaan tefa pengimbasan, sehingga program dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan seleksi lanjutan dengan melakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap SMK yang pernah mendaftar untuk mengajukan program pengembangan SMK Pusat Keunggulan sehingga dapat mempercepat terpenuhinya kuota dari penerima program yang belum mencapai target.
3. Dilakukan penagihan secara intensif kepada satuan pendidikan SMK agar segera melengkapi dan mempercepat pengiriman dokumen pendukung yang diperlukan untuk kemudian dilakukan penyaluran susulan untuk 4 SMK yang mengalami keterlambatan.

[SK 3] Meningkatnya tata kelola Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan

[IKK 3.1] Predikat SAKIP Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan

Progress/Kegiatan

- Kegiatan pemenuhan serta perbaikan dokumen SAKIP untuk dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan dari pihak yang berkepentingan dalam rangka peningkatan nilai dalam bentuk pemantauan rutin terhadap ketercapaian target indikator kinerja Direktorat SMK;
- Evaluasi terhadap capaian akhir renstra 2019-2024 sebagai bentuk persiapan masa pembangunan nasional dan renstra Kemendikbudristek 2025-2029. Perlunya dilakukan evaluasi renstra yang sudah dilaksanakan dengan target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2019-2024 merupakan bagian dari penyusunan rencana kerja berbasis data capaian kinerja sebelumnya.

Kendala/Permasalahan

- Pengumpulan data dan pemenuhan dokumen SAKIP diantaranya diseminasi terhadap pelaksanaan program dalam rangka mendukung ketercapaian target indikator kinerja;
- Beberapa program yang diberikan kepada sekolah perlu dilakukan upaya pemantauan serta evaluasi agar mempunyai dampak dalam mendukung ketercapaian target kinerja;

Strategi/Tindak Lanjut

- Melakukan koordinasi Tim SAKIP dengan pimpinan sehingga pelaksanaan program sesuai dengan target kinerja;
- Melakukan pendampingan secara intensif kepada sekolah penerima program bantuan agar sesuai dengan tujuan program dalam mencapai target kinerja lembaga.

[SK 3] Meningkatnya tata kelola Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan

[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan

Progress/Kegiatan

- Melakukan review rutin bulanan dan triwulanan terkait kesesuaian realisasi penyerapan anggaran dengan rencana penyerapan anggaran.
- Penyusunan Standar Biaya Keluaran (SBK) sebagai bentuk peningkatan penilaian NKA Direktorat SMK sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang berlaku.



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Kendala/Permasalahan

Penyerapan masih belum sesuai rencana (RPD) yang telah ditetapkan dalam system aplikasi Sakti Kemenkeu dikarenakan adanya perubahan metode pelaksanaan serta perubahan perencanaan jadwal pelaksanaan kegiatan.

Strategi/Tindak Lanjut

Pelaksana/PIC kegiatan akan berkoordinasi dengan tim perencanaan program agar melakukan penyesuaian kembali terkait rencana penyerapan dan rencana jadwal pelaksanaan kegiatan. Disamping itu, pelaksanaan program perlu diberikan pemantauan rutin agar sesuai dengan rencana yang sudah diisikan dalam system Sakti Kemenkeu.

C. Capaian Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

Rincian Output	Satuan	Fisik			Anggaran		
		Target	Capaian	Sisa	Pagu	Realisasi	Sisa
[DL.4262.PDI.040] Siswa SMK yang Tersertifikasi Terhadap Kompetensi yang Relevan dengan Kebutuhan Dunia Kerja	Orang	125000	142568	0	Rp73.651.649.000	Rp67.457.448.354	Rp6.194.200.646
[DL.4262.PDI.041] Siswa SMK yang Mendapatkan Penguatan Persiapan Program Magang Luar Negeri	Orang	3200	3639	0	Rp52.235.680.000	Rp47.339.253.172	Rp4.896.426.828
[DL.4262.QDB.007] SMK yang Dikembangkan Menjadi Pusat Keunggulan	Lembaga	1340	1478	0	Rp1.118.932.440.000	Rp854.008.197.917	Rp264.924.242.083
[DL.4262.QDB.022] SMK yang Melaksanakan Program UKS	Lembaga	72	70	2	Rp3.705.800.000	Rp3.437.958.561	Rp267.841.439
[DL.4262.QDB.042] SMK yang Mengembangkan Proyek Kreatif dan Kewirausahaan	Lembaga	240	239	1	Rp14.090.000.000	Rp13.721.849.378	Rp368.150.622
[DL.4262.QDB.049] SMK yang Dikembangkan Berbasis Industri 4.0	Lembaga	63	63	0	Rp72.212.500.000	Rp59.136.101.623	Rp13.076.398.377
[DL.4262.QDB.050] SMK yang Mendapatkan Pendampingan Peningkatan Mutu	Lembaga	72	65	7	Rp41.254.192.000	Rp29.684.982.382	Rp11.569.209.618



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Rincian Output	Satuan	Fisik			Anggaran		
		Target	Capaian	Sisa	Pagu	Realisasi	Sisa
[DL.4262.QDB.051] SMK yang Mengembangkan Pengajaran Berbasis Pabrik (Teaching Factory)	Lembaga	315	315	0	Rp280.746.730.000	Rp199.897.518.430	Rp80.849.211.570
[WA.4261.EBA.956] Layanan BMN	Dokumen	1	0	1	Rp10.000.000	Rp0	Rp10.000.000
[WA.4261.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	1	1	0	Rp4.756.366.000	Rp2.177.854.148	Rp2.578.511.852
[WA.4261.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	0	Rp25.835.990.000	Rp19.703.852.583	Rp6.132.137.417
[WA.4261.EBB.951] Layanan Sarana Internal	Unit	21	16	5	Rp265.015.000	Rp199.810.800	Rp65.204.200
Total Anggaran					Rp1.687.696.362.000	Rp1.296.764.827.348	Rp390.931.534.652

D. Rekomendasi Pimpinan

Pelaksanaan pengukuran capaian kinerja Triwulan III merupakan bagian dari proses penting dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program/kegiatan yang merupakan pendukung ketercapaian indikator kinerja pada Direktorat SMK. Beberapa hal yang mungkin perlu menjadi poin untuk dapat ditindaklanjuti diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Berkenaan dengan IKK Persentase lulusan SMK yang berhasil memperoleh kompetensi yang sesuai dengan dunia kerja, beberapa program pendukung diantaranya sertifikasi perlu diberikan pemantauan secara intensif dan pemutakhiran datanya agar dikawal dengan baik sehingga data terkait siswa yang mendapatkan sertifikasi sesuai kebutuhan dunia kerja dapat dikumpulkan dengan valid. Disamping itu, program lainnya yang mendorong peningkatan kualitas dan mutu lulusan SMK juga perlu diberikan pendampingan sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Hasil capaian AN maupun data dari sistem tracer study dapat dimanfaatkan untuk memetakan SMK dengan kondisi capaian menengah ke bawah agar diberikan advokasi yang lebih intensif dengan melibatkan BBPPMPV.
2. Dalam rangka mendorong ketercapaian IKK Persentase SMK yang menerapkan pembelajaran link and match dengan dunia kerja, para pengampu program dapat melakukan analisis ketercapaian hasil pembelajaran di satuan pendidikan SMK melalui hasil rapor pendidikan. Cara ini sebagai bentuk advokasi dalam melalui evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran di sekolah, sehingga perangkat satuan pendidikan beserta komunitas pendidikan lainnya dapat membantu upaya peningkatan program-program sebagai bentuk pembenahan dari capaian rapor pendidikan sekolah.
3. Predikat SAKIP Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan perlu diupayakan agar nilainya dapat mencapai BB atau bahkan A, sehingga semua pemangku/PIC program di lingkup Direktorat SMK perlu melakukan koordinasi secara rutin sebagai bentuk control terhadap capaian nilai sakip. Subbag Tata Usaha diharapkan meningkatkan perannya dalam melakukan kontrol terhadap administrasi yang dilaksanakan masing-masing pokja agar sesuai dengan kaidah akuntabilitas dalam pengelolaan program dan anggaran keuangan negara.
4. Meningkatkan Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan agar mencapai nilai 94 memang membutuhkan upaya yang lebih besar dari setiap pemangku kegiatan terlebih lagi yang mengelola keuangan. Perlu dibangun sinergi diantara pemangku/PIC kegiatan agar bisa lebih fleksibel dalam melaksanakan kegiatan.

Jakarta, 31 Oktober 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Sekolah Menengah Kejuruan
Muhammad Yusro



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Balai
Sertifikasi
Elektronik

d. Triwulan IV



**Laporan Kinerja Triwulan 4
Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan
Tahun 2024**

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan selama triwulan 4 tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
[SK 1] Meningkatnya kompetensi lulusan SMK yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja				
[IKK 1.1] Persentase lulusan SMK yang berhasil memperoleh kompetensi yang sesuai dengan dunia kerja	40	%	40	49.53
[SK 2] Meningkatnya relevansi pembelajaran SMK dengan kebutuhan dunia kerja				
[IKK 2.1] Persentase SMK yang menerapkan pembelajaran link and match dengan dunia kerja	48	%	48	37.56
[SK 3] Meningkatnya tata kelola Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan				
[IKK 3.1] Predikat SAKIP Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan	BB	Predikat	BB	A
[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan	94	Nilai	94	98.17

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Meningkatnya kompetensi lulusan SMK yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja
[IKK 1.1] Persentase lulusan SMK yang berhasil memperoleh kompetensi yang sesuai dengan dunia kerja

Progress/Kegiatan

Untuk mendukung meningkatnya kompetensi lulusan SMK yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja diantaranya dilakukan melalui standarisasi dengan uji kompetensi keahlian. Dimana dalam pelaksanaannya terdapat 3 pola yang dapat dilaksanakan untuk uji kompetensi keahlian, yaitu melalui UKK mandiri, oleh LSP dan UKK oleh Dunia kerja/Asosiasi Profesi. Dalam beberapa kesempatan, Direktorat SMK mendorong satuan pendidikan SMK agar melakukan UKK pada peserta didik melalui pihak ketiga (LSP atau Dunia Kerja/Asosiasi Profesi). Beberapa intervensi yang diberikan melalui program bantuan merupakan salah satu penyumbang untuk ketercapaian sebanyak sebesar 49,53% dari lulusan SMK yang mempunyai kompetensi sesuai dengan dunia kerja. Sementara beberapa program bantuan yang secara langsung memberikan pembiayaan untuk uji kompetensi adalah sebagai berikut:



Catatan :
 • UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

1. Bantuan Sertifikasi Kompetensi dan bahasa asing Siswa SMK

Pelaksanaan pemanfaatan anggaran bantuan di sekolah sudah pada tahap penyelesaian administrasi dalam rangka penyaluran laporan 100% (penyelesaian) dan laporan tersebut harus disampaikan paling lambat pada bulan Desember tahun 2024.

2. Siswa yang mendapatkan Penguatan Persiapan Magang Luar Negeri

Pelaksanaan pemanfaatan anggaran bantuan di sekolah sudah pada tahap penyelesaian administrasi dalam rangka penyaluran laporan 100% (penyelesaian) dan laporan tersebut harus disampaikan paling lambat pada bulan Desember tahun 2024.

Kendala/Permasalahan

Untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa pada level tertentu sesuai kompetensi keahlian yang ditempuh selama masa pembelajaran di SMK, maka dilakukan Uji Kompetensi Keahlian (UKK). Sebagai cara dalam menjaga mutu lulusan SMK, maka melibatkan pihak ketiga (oleh LSP dan Dunia Kerja/Asosiasi Profesi) dalam proses uji kompetensi lebih diutamakan karena sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Namun dalam pelaksanaannya membutuhkan biaya yang terkadang tidak mampu untuk dipenuhi oleh pihak sekolah bersama peserta didik/wali murid. Disamping itu, untuk beberapa kompetensi keahlian di SMK belum mempunyai lembaga sertifikasi pihak ketiga sesuai dengan kompetensi keahlian yang dibuka SMK.

Strategi/Tindak Lanjut

Melalui koordinasi dengan Direktorat Mitras DUDI untuk menyusun sekaligus mengusulkan ke BNSP untuk skema okupasi yang sesuai dengan kompetensi keahlian yang dibuka di SMK sehingga dapat diselenggarakan sertifikasi kepada peserta didik melalui LSP P1 yang dimiliki di sekolah. **Perhitungan terhadap capaian ini juga menunggu rilis resmi terhadap hasil pada rapor pendidikan untuk satuan pendidikan SMK.**

[SK 2] Meningkatnya relevansi pembelajaran SMK dengan kebutuhan dunia kerja

[IKK 2.1] Persentase SMK yang menerapkan pembelajaran link and match dengan dunia kerja

Progress/Kegiatan

Penerapan pembelajaran link and match dengan dunia kerja merupakan salah satu upaya untuk menjadikan pendidikan SMK agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Seluruh intervensi yang diberikan dengan bentuk program bantuan penggunaannya selalu terdapat link and match untuk semua aspek dalam pembelajaran di sekolah. Diantara program bantuan yang diberikan sebagai upaya untuk mendorong agar pembelajaran di SMK sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dijelaskan sebagai berikut:

1. SMK yang Dikembangkan menjadi Pusat Keunggulan

Pada triwulan IV ini, masih ada penyaluran termin ke-2 bagi sekolah yang sudah memenuhi persyaratannya. Terindikasi ada dua sekolah yang menolak penyaluran termin ke-2 atas permintaan sekolah tersebut. Secara umum, pelaksanaan pemanfaatan anggaran bantuan di sekolah sampai pada bulan Desember sudah pada tahap penyelesaian administrasi dalam rangka penyaluran laporan 100% (penyelesaian) dan laporan tersebut harus disampaikan paling lambat pada bulan Desember tahun 2024.

2. SMK yang Dikembangkan Berbasis Industri 4.0

Pelaksanaan pemanfaatan anggaran bantuan di sekolah sudah pada tahap penyelesaian administrasi dalam rangka penyaluran laporan 100% (penyelesaian) dan laporan tersebut harus disampaikan paling lambat pada bulan Desember tahun 2024.



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Balai
Sertifikasi
Elektronik

3. Penyaluran Bantuan SMK yang Mengembangkan Proyek Kreatif dan Kewirausahaan

Pelaksanaan pemanfaatan anggaran bantuan di sekolah sudah pada tahap penyelesaian administrasi dalam rangka penyaluran laporan 100% (penyelesaian) dan laporan tersebut harus disampaikan paling lambat pada bulan Desember tahun 2024.

4. SMK yang Mengembangkan Pengajaran Berbasis Pabrik (Teaching Factory)

Pada triwulan IV ini, masih ada penyaluran termin ke-2 bagi sekolah yang sudah memenuhi persyaratannya. Terindikasi ada satu sekolah yang menolak penyaluran termin ke-2 atas permintaan sekolah tersebut. Secara umum, pelaksanaan pemanfaatan anggaran bantuan di sekolah sampai pada bulan Desember sudah pada tahap penyelesaian administrasi dalam rangka penyaluran laporan 100% (penyelesaian) dan laporan tersebut harus disampaikan paling lambat pada bulan Desember tahun 2024.

Kendala/Permasalahan

Capaian pada IKK 2.1 belum bisa dihitung karena salah satu sumber dari capaian adalah hasil dari AN yang dilakukan oleh sekolah. Per Desember 2024, data dari AN masih dalam tahap pengumpulan dan pengolahan.

Strategi/Tindak Lanjut

Capaian yang disampaikan saat ini adalah capaian yang telah dicapai pada tahun 2023. Capaian untuk tahun 2024 akan dihitung lagi di awal tahun 2025 yang diharapkan pada bulan Januari untuk kebutuhan penyusunan laporan kinerja, data yang dibutuhkan sudah bisa diperoleh.

[SK 3] Meningkatnya tata kelola Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan

[IKK 3.1] Predikat SAKIP Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan

Progress/Kegiatan

Hasil penilaian AKIP Dit. SMK sudah diterbitkan oleh inspektorat selaku penilai AKIP satker yang ada di Kemdikbudristek. Nilai akhir yang telah rilis, sebelumnya sudah melewati proses penyanggahan. Kegiatan penyanggahan dilakukan oleh Setditjen Diksi dengan mengundang satker yang ada di bawahnya, termasuk Direktorat SMK.

Kendala/Permasalahan

Masih ada nilai yang belum maksimal, salah satunya adalah dokumen terkait pelaksanaan punishment terkait kinerja yang dilakukan oleh pegawai.

Strategi/Tindak Lanjut

Menyampaikan hasil dari Evaluasi AKIP dan saran perbaikan yang bisa dilakukan ke depannya dalam rangka meningkatkan nilai AKIP.

[SK 3] Meningkatnya tata kelola Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan

[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan

Progress/Kegiatan



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Upaya peningkatan tata kelola pada Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan bagian dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, hal ini salah satunya diukur dari NKA (Nilai Kinerja Anggaran) atas pelaksanaan RKA-K/L yang semakin baik. Pelaksanaan kinerja anggaran sangat dipengaruhi oleh tata kelola dan proses administrasi anggaran, sehingga terus dilakukan sesuai dengan ketentuan dan rencana yang ada diharapkan mampu meningkatkan NKA (Nilai Kinerja Anggaran). Per Desember 2024, NKA yang diperoleh Direktorat SMK tersebut terdiri dari nilai EKA (Evaluasi Kinerja Anggaran) sebesar 100 dan nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) 96.34.

Kendala/Permasalahan

Nilai IKPA yang dirasa masih belum maksimal dikarenakan salah satu penyebabnya adalah deviasi pada halamn III DIPA yang masih tinggi sehingga belum mampu menjadi komponen penambah nilai. Deviasi yang tinggi terjadi akibat masih adanya ketidaksesuaian antara rencanan penyerapan dan realisasinya untuk tiap bulannya. Dengan postur anggaran pada Direktorat SMK yang sebagian besar merupakan bantuan pemerintah yang diberikan kepada satuan pendidikan, sehingga dinamika yang sering terjadi adalah penerima bantuan belum dapat memenuhi dokumen administrasi yang dipersyaratkan dan turut menjadi faktor penyerapan tidak sesuai dengan rencana.

Strategi/Tindak Lanjut

Terus berkoordinasi dengan penerima bantuan untuk menyelesaikan administrasinya sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan, agar penyaluran dana bantuan dalam rangka pennyerapan anggaran Direktorat SMK tidak meleset dari rencana yang ada.

C. Capaian Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

Rincian Output	Satuan	Fisik			Anggaran		
		Target	Capaian	Sisa	Pagu	Realisasi	Sisa
[DL.4262.PDI.040] Siswa SMK yang Tersertifikasi Terhadap Kompetensi yang Relevan dengan Kebutuhan Dunia Kerja	Orang	125000	142568	0	Rp73.651.649.000	Rp72.866.105.654	Rp785.543.346
[DL.4262.PDI.041] Siswa SMK yang Mendapatkan Penguatan Persiapan Program Magang Luar Negeri	Orang	3200	3639	0	Rp52.235.680.000	Rp50.928.194.150	Rp1.307.485.850
[DL.4262.QDB.007] SMK yang Dikembangkan Menjadi Pusat Keunggulan	Lembaga	1340	1478	0	Rp1.118.932.440.000	Rp1.104.495.892.422	Rp14.436.547.578
[DL.4262.QDB.022] SMK yang Melaksanakan Program UKS	Lembaga	72	72	0	Rp3.705.800.000	Rp3.691.776.461	Rp14.023.539
[DL.4262.QDB.042] SMK yang Mengembangkan Proyek Kreatif dan Kewirausahaan	Lembaga	240	240	0	Rp14.090.000.000	Rp13.778.706.478	Rp311.293.522



Catatan :
 • UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Rincian Output	Satuan	Fisik			Anggaran		
		Target	Capaian	Sisa	Pagu	Realisasi	Sisa
[DL.4262.QDB.049] SMK yang Dikembangkan Berbasis Industri 4.0	Lembaga	63	63	0	Rp72.212.500.000	Rp71.189.601.488	Rp1.022.898.512
[DL.4262.QDB.050] SMK yang Mendapatkan Pendampingan Peningkatan Mutu	Lembaga	72	72	0	Rp41.254.192.000	Rp35.871.660.186	Rp5.382.531.814
[DL.4262.QDB.051] SMK yang Mengembangkan Pengajaran Berbasis Pabrik (Teaching Factory)	Lembaga	315	315	0	Rp280.746.730.000	Rp280.057.290.369	Rp689.439.631
[WA.4261.EBA.956] Layanan BMN	Dokumen	1	1	0	Rp10.000.000	Rp8.000.000	Rp2.000.000
[WA.4261.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	1	1	0	Rp4.756.366.000	Rp4.062.277.194	Rp694.088.806
[WA.4261.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	0	Rp26.064.550.000	Rp24.055.890.908	Rp2.008.659.092
[WA.4261.EBB.951] Layanan Sarana Internal	Unit	21	21	0	Rp265.015.000	Rp265.010.800	Rp4.200
Total Anggaran					Rp1.687.924.922.000	Rp1.661.270.406.110	Rp26.654.515.890

D. Rekomendasi Pimpinan

Pengukuran capaian kinerja Triwulan IV merupakan bagian penting dalam melakukan evaluasi terhadap hasil dari pelaksanaan program/kegiatan yang merupakan intervensi pendukung untuk ketercapaian indikator kinerja dari Direktorat SMK. Beberapa yang mungkin perlu menjadi poin untuk dapat ditindaklanjuti dan dijadikan rekomendasi kemudian hari diantaranya sebagai berikut:

1. Berkenaan dengan IKK Persentase lulusan SMK yang berhasil memperoleh kompetensi yang sesuai dengan dunia kerja, beberapa program pendukung diantaranya sertifikasi perlu dilakukan evaluasi secara komprehensif dan pemutakhiran datanya agar dikawal dengan baik sehingga data terkait siswa yang mendapatkan sertifikasi sesuai kebutuhan dunia kerja dapat dikumpulkan dengan valid. Disamping itu, program lainnya yang mendorong peningkatan kualitas dan mutu lulusan SMK juga perlu diberikan pendampingan sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Hasil capaian AN maupun data dari sistem tracer study dapat dimanfaatkan untuk memetakan SMK dengan kondisi capaian menengah ke bawah agar diberikan advokasi yang lebih intensif dengan melibatkan BBPPMPV.
2. Dalam rangka mendorong ketercapaian IKK Persentase SMK yang menerapkan pembelajaran link and match dengan dunia kerja, para pengampu program dapat melakukan analisis ketercapaian hasil pembelajaran di satuan pendidikan SMK melalui hasil capaian rapor pendidikan satpen. Cara ini sebagai bentuk advokasi dalam melalui evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran di sekolah, sehingga perangkat satuan pendidikan beserta komunitas pendidikan lainnya dapat membantu upaya peningkatan program-program sebagai bentuk pembenahan dari capaian rapor pendidikan sekolah.
3. Predikat SAKIP Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan perlu diupayakan agar nilainya dapat mencapai AA, sehingga semua pemangku/PIC program kegiatan di lingkup Direktorat SMK perlu melakukan koordinasi secara rutin sebagai bentuk kontrol terhadap capaian nilai sakip. Subbag Tata Usaha selaku koordinator pengelola anggaran diharapkan meningkatkan perannya dalam melakukan kontrol terhadap administrasi yang dilaksanakan masing-masing tim kerja agar sesuai dengan kaidah akuntabilitas dalam pengelolaan program dan anggaran keuangan negara.
4. Agar mampu mempertahankan atau meningkatkan Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan yang telah mencapai nilai 98, karena memang membutuhkan upaya yang lebih besar dari setiap pemangku kegiatan terlebih lagi yang mengelola keuangan. Perlu dibangun sinergi diantara pemangku/PIC kegiatan agar bisa lebih fleksibel sesuai aturan dalam melaksanakan kegiatan.

Jakarta, 31 Desember 2024


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Direktur Sekolah Menengah Kejuruan
 Muhammad Yusro



Catatan :
 • UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E



4. Surat Pernyataan Laporan Kinerja telah Direviu

Pernyataan Telah Direviu
Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan
Tahun Anggaran 2024

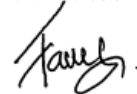
Kami telah mereviu laporan kinerja Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan untuk tahun anggaran 2024 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 30 Januari 2025

Ketua Tim Reviu,



Fachri Mirzanth

NO	PERNYATAAN		KETERANGAN	CEKLIST		CATATAN
				YA	TIDAK	
I	Format	1. Laporan kinerja telah menyajikan data penting unit kerja	Periksa BAB I dan BAB II pada laporan kinerja sudah memuat informasi terkait gambaran umum, dasar hukum, tugas dan fungsi, serta visi dan misi atau tujuan organisasi sesuai dengan kebijakan atau peraturan yang berlaku di unit kerja	✓		Telah memenuhi standar penulisan laporan kinerja
		2. Laporan kinerja telah menyajikan informasi target kinerja	Periksa BAB II pada Lakin apakah sudah menyajikan informasi target kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja	✓		Bab 2 telah menyajikan informasi target kinerja sesuai perjanjian kinerja
		3. Laporan kinerja telah menyajikan capaian kinerja yang memadai	Periksa BAB III pada Lakin apakah telah menyajikan informasi capaian kinerja yang memadai (penjelasan ketercapaian, kendala, permasalahan dan tindak lanjut) dari sasaran dan indikator yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja	✓		Bab 3 telah menyajikan informasi capaian kinerja yang memadai serta penjelasan ketercapaian, hambatan/kendala serta tindak lanjut sesuai perjanjian kinerja
		4. Telah menyajikan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	Periksa lampiran pada Lakin, apakah terdapat templan informasi yang mendukung kesesuaian target kinerja serta capaiannya. Lampiran dapat berupa Pengukuran Kinerja, Perjanjian Kinerja awal, Perjanjian Kinerja Revisi (akhir), serta data lain yang mendukung pencapaian Lakin	✓		Mohon Ditambah data lain yang relevan dengan isi Lakin
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	Periksa BAB IV pada Lakin, apakah sudah menyajikan informasi terkait upaya perbaikan kedepan dengan jelas dan detail	✓		BAB 4 laporan kinerja sudah menyajikan informasi terkait upaya perbaikan kedepan dengan jelas dan detail
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	Periksa BAB III pada Lakin apakah sudah menyajikan informasi terkait realisasi anggaran termasuk informasi atas efisiensi sumberdaya/anggaran		✓	BAB 3 laporan kinerja sudah menyajikan informasi terkait realisasi anggaran belum termasuk informasi efisiensi anggaran, Terkait pencapaian Output yang lebih besar dari Rencana harap di perjelas, penyebab dan dampak terhadap pencapaian kinerja
II	Mekanisme Penyusunan	1. Laporan kinerja disusun oleh tim yang bentuk atau unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi menyusun laporan kinerja	Periksa SK Tim Penyusun Lakin Satker untuk melihat apakah Lakin disusun oleh Tim (Orang/subbagian/bagian/unit/ instansi) yang memiliki tugas dan fungsi penyusunan Lakin yang paling sedikit terdiri dari unsur perencanaan, keuangan dan		✓	Mohon diilengkapi SK tim penyusun laporan kinerja yang terdiri dari unsur perencanaan, keuangan dan kepegawaian
		2. Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah didukung dengan data yang memadai	Periksa apakah informasi pada Lakin telah didukung dengan data kinerja yang memadai (data rencana kinerja dan capaian kinerja) sesuai dengan pertanyaan pada butir 1 sd 6 pada Format Reviu	✓		Informasi pada Lakin telah didukung dengan data kinerja yang memadai (data rencana kinerja dan capaian kinerja) sesuai dengan pertanyaan pada butir 1 sd 6 pada Format Reviu
		3. Telah terdapat mekanisme penyimpanan data dan informasi dari unit kerja ke tim/unit penyusun laporan kinerja	Periksa SOP/POS pengumpulan data kinerja atau SOP/POS penyusunan Lakin untuk melihat apakah terdapat mekanisme penyimpanan data yang jelas dari unit kerja ke penyusun Lakin		✓	Belum ada SOP/POS pengumpulan data kinerja atau SOP/POS penyusunan Lakin telah menunjukkan mekanisme penyimpanan data yang jelas
		4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi dari setiap unit kerja	Periksa SOP/POS pengumpulan data kinerja untuk melihat apakah terdapat penanggung jawab yang jelas dalam melakukan pengumpulan data/informasi		✓	Belum ada SOP/POS pengumpulan data kinerja atau SOP/POS penyusunan Lakin telah menunjukkan mekanisme penyimpanan data yang jelas
		5. Data/informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah diikhtisarkan ke dalam	Periksa Definisi Operasional, POS pengumpulan data kinerja, Dokumen Pengukuran Kinerja berkala pada aplikasi SPASIKITA dan dokumen pendukung lainnya untuk memberikan keyakinan bahwa data kinerja pada Lakin diikhtisarkan ke dalam		✓	Belum ada POS pengumpulan data kinerja, sehingga belum dapat diikhtisarkan apakah Dokumen Pengukuran Kinerja secara berkala pada aplikasi SPASIKITA

NO	PERNYATAAN		KETERANGAN	CEKLIST		CATATAN
				YA	TIDAK	
III	Substansi	6. Analisis/penjelasan dalam Laporan Kinerja telah diketahui oleh unit kerja terkait	Periksa apakah analisis/penjelasan dari setiap indikator pada Lakin sudah diketahui oleh penanggungjawab setiap indikator atau penanggungjawab kegiatan yang mendukung indikator tersebut		✓	analisis/penjelasan dari setiap indikator pada Lakin masih bersifat umum, perlu ada POS atau mekanisme agar analisis beserta dokumen diketahui oleh penanggungjawab setiap indikator atau penanggungjawab kegiatan yang mendukung indikator tersebut
		7. Laporan Kinerja triwulanan merupakan gabungan partisipasi dari bawahnya	Periksa apakah data pada laporan kinerja triwulanan merupakan hasil dari capaian kinerja dari seluruh unit kerja yang ada	✓		data pada laporan kinerja triwulanan merupakan hasil dari capaian kinerja per triwulan
		1. Sasaran dalam laporan kinerja telah sesuai dengan sasaran dalam perjanjian kinerja	Periksa apakah Sasaran pada Lakin sudah selaras/sesuai dengan sasaran yang ada pada Perjanjian Kinerja	✓		Sasaran pada Lakin sudah selaras/sesuai dengan sasaran yang ada pada Perjanjian Kinerja
		2. Sasaran dalam laporan kinerja telah selaras dengan rencana strategis	Periksa apakah Tujuan dan sasaran pada Lakin sudah selaras dengan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis (Renstra)	✓		Tujuan dan sasaran pada Lakin sudah selaras dengan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis (Renstra)
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	Terdapat penjelasan yang memadai pada Lakin, jika pertanyaan pada butir 1 dan 2 jawabannya tidak			
		4. KSS/IKP/IKK dalam laporan kinerja telah sesuai dengan KSS/IKP/IKK dalam perjanjian kinerja	Periksa apakah indikator kinerja pada Lakin selaras/sesuai dengan indikator kinerja yang ada pada Perjanjian Kinerja dan Renstra	✓		Indikator kinerja pada Lakin selaras/sesuai dengan indikator kinerja yang ada pada Perjanjian Kinerja dan Renstra
		5. Jika butir 4 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	Periksa apakah Tujuan/sasaran pada Lakin telah sesuai dengan tujuan/sasaran pada Indikator Kinerja Utama dalam Renstra	✓		Tujuan/sasaran pada Lakin telah sesuai dengan tujuan/sasaran pada Indikator Kinerja Utama dalam Renstra
		6. Telah terdapat perbandingan data kinerja baik dengan tahun berjalan, dengan tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya dan target akhir	Jika jawaban "tidak" pada pertanyaan butir 4 dan 5, maka terdapat penjelasan yang memadai			
		7. Terdapat uraian analisis kinerja (program/kegiatan pendukung pencapaian indikator kinerja/ hambatan dan kendala/langkah antisipasi) pada setiap indikator kinerja	Periksa apakah Data/informasi dalam Lakin menyajikan perbandingan data dengan tahun lalu, dengan standar nasional dan perbandingan dengan target akhir pada Renstra	✓		Data/informasi dalam Lakin telah menyajikan perbandingan data dengan tahun lalu, dengan standar nasional dan perbandingan dengan target akhir pada Renstra
		8. Terdapat uraian tingkat pencapaian sasaran sampai dengan tahun berjalan	Periksa apakah indikator kinerja yang ada dapat dijadikan sebagai alat ukur dari tujuan dan sasaran yang ditetapkan	✓		Indikator kinerja yang ada dapat dijadikan sebagai alat ukur dari tujuan dan sasaran yang ditetapkan
		9. KSS/IKP/IKK telah cukup mengukur sasaran	Jika jawaban "tidak" pada pertanyaan butir 8, maka terdapat penjelasan yang memadai			
		10. KSS/IKP/IKK telah SMART	Periksa apakah indikator kinerja yang ada telah memenuhi kriteria SMART (spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, mengukur waktu tertentu, cukup)	✓		Indikator kinerja yang ada telah memenuhi kriteria SMART (spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, mengukur waktu tertentu, cukup)